

SKRIPSI

**DIPLOMASI PEMERINTAH MELALUI JEJARING KOTA
CERDAS UNTUK PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DI
KOTA MAKASSAR**



Oleh:

NURHALIZA

Nomor Induk Mahasiswa : 105641105520

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2024

SKRIPSI

**DIPLOMASI PEMERINTAH MELALUI JEJARING KOTA
CERDAS UNTUK PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DI
KOTA MAKASSAR**

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Menyelesaikan Studi dan
Memperoleh
Gelar Sarjana Ilmu Politik (S.IP)

Disusun dan Diajukan Oleh:

NURHALIZA

Nomor Induk Mahasiswa : 105641105520

Kepada

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2024

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Diplomas Pemerintah Melalui Jejaring Kota
Cerdas Untuk Pembangunan Berkelanjutan Di
Kota Makassar

Nama Mahasiswa : NURHALIZA

Nomor Induk Mahasiswa : 105641105520

Program Studi : Ilmu Pemerintahan



Menyetujui

Pembimbing I

Pembimbing II

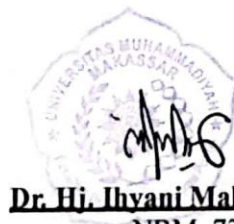
Ahmad Harakan, S.IP., M.H.I

Nur Khaerah, S.IP., M.IP

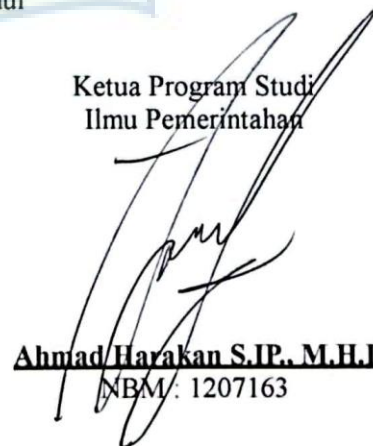
Mengetahui

Dekan
Fisipol Unismuh Makassar

Ketua Program Studi
Ilmu Pemerintahan



Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si
NBM. 730727



Ahmad Harakan S.IP., M.H.I
NBM: 1207163

HALAMAN PENERIMAAN TIM

Telah Diterima Oleh Tim Penguji Skripsi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar dengan nomor 0290/FSP/A.4-II/VIII/46/2024 sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dengan memperoleh gelar sarjana dalam Program Studi Ilmu Pemerintahan yang dilaksanakan di Makassar pada hari Jumat, Tanggal 16 Agustus 2024



Mengetahui

Ketua

Sekretaris

Dr. Hj. Jhanyi Malik, S.Sos., M.Si

NBM. 730727

Dr. Andi Luhur Prianto, S.IP., M.Si

NBM. 992797

Tim Penguji

1. Dr. Abdul Mahsyar, M.Si
2. Dr. Nur Wahid, S.Sos., M.Si
3. Ahmad Harakan, S.IP., M.H.I
4. Nursaleh Hartaman, S.IP., M.IP

()
()
()
()

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Nurhaliza

Nomor Induk Mahasiswa : 105641105520

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Menyatakan bahwa benar skripsi ini adalah karya saya sendiri dan bukan hasil plagiat dari sumber lain. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik dan pemberian sanksi lainnya sesuai dengan aturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 28 Mei 2024

Yang Menyatakan,

Nurhaliza

ABSTRAK

Nurhaliza. 2024. Diplomasi Pemerintah Melalui Jejaring Kota Cerdas Untuk Pembangunan Berkelanjutan Di Kota Makassar. (Dibimbing oleh Ahmad Harakan dan Nur Khaerah).

Di era digital yang semakin maju saat ini, pemerintah harus lebih sensitif serta tanggap dalam memanfaatkan teknologi yang ada. Memberikan Sistem Pelayanan yang baik adalah hak masyarakat, dengan adanya *smart city* Pemerintah harus melakukan berbagai inovasi untuk membangun Daerah dan Kota seperti Kota Makassar yang terkenal dengan adanya program *smart city*. Berdasarkan hal tersebut, kajian penelitian ini bertujuan mendeskripsikan dan menjelaskan mengenai langkah apa yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Makassar melalui jejaring Kota Cerdas untuk Pembangunan berkelanjutan.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan instrument yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi untuk menjelaskan diplomasi pemerintah melalui jejaring kota cerdas untuk pembangunan berkelanjutan di Kota Makassar. Informan dalam penelitian ini meliputi Pemerintah dan masyarakat setempat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan adanya *smart city* dalam menjalankan program tersebut Pemerintah Kota Makassar menetapkan 3 poin yakni Pemerintahan terintegritasi, Kolaborasi, dan Birokrasi yang efisien (*efficient e-governance*). Dengan diterapkannya ketiga poin tersebut maka dapat menajalan program Kota cerdas untuk pembangunan berkelanjutan di Kota Makassar.

Kata kunci : kota cerdas, pemerintah, pembangunan berkelanjutan

KATA PENGANTAR

Penulis panjatkan rasa syukur yang tidak terhingga kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “*Diplomasi Pemerintah Melalui Jejaring Kota Cerdas Untuk Pembangunan Berkelanjutan Di Kota Makassar*”.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis persembahkan skripsi ini dan menyampaikan banyak ucapan terima kasih kepada orang-orang yang penulis sayangi:

1. Kepada cinta pertamaku dan panutanku, Ayahanda Imran dg. Mannang. Beliau memang tidak sempat merasakan Pendidikan sampai bangku perkuliahan, namun beliau mampu mendidik penulis, memotivasi, memberi dukungan hingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai sarjana.
2. Kepada surgaku yang tersayang, Ibunda Sarpiah. Beliau sangat berperan penting dalam menyelesaikan program studi penulis, beliau memang juga tidak sempat merasakan Pendidikan sampai bangku perkuliahan, namun semangat dan motivasi serta doanya yang selalu dipanjatkan untuk kesuksesan anak-anaknya. Terima kasih atas nasihat yang diberikan dan terima kasih sudah menjadi pengingat dan penguat yang paling hebat. Terima kasih mama.
3. Bapak Ahmad Harakan, S.IP.,M.H.I selaku Ketua Prodi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar sekaligus pembimbing pertama saya dan juga Ibu Nur Khaerah, S.IP.,M.I.P selaku pembimbing kedua saya yang telah banyak mengajarkan dan membimbing saya.

4. Ibu Dr. Ihyani Malik, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
5. Seluruh dosen program studi ilmu pemerintahan fakultas ilmu sosial dan ilmu politik yang membagikan ilmunya selama proses perkuliahan.
6. Kepada pemerintah kota makassar dan seluruh informan yang telah membantu dan memberikan informasi kepada penulis dalam melaksanakan penelitian.
7. Kepada 4 saudara kandung saya terutama kakak pertama saya, Nasrullah Imran. Terima kasih banyak atas semua kebaikan yang diberikan kepada penulis selama proses perkuliahan hingga sampai dititik ini.
8. Kepada bestie saya, Riska ikbal. Terima kasih telah kebersamaian suka dan duka penulis yang senantiasa memberikan semangat dan dukungan dari awal hingga akhir.
9. Terakhir, terima kasih untuk diri sendiri karena telah mampu berusaha keras dan berjuang sejauh ini. Mampu mengendalikan diri dari berbagai tekanan diluar keadaan dan tak pernah memutuskan menyerah sesulit apapun proses penyusunan skripsi ini dengan menyelesaikan dengan sebaik dan semaksimal mungkin, ini merupakan pencapaian yang patut dibanggakan untuk diri sendiri.

Demi kesempurnaan skripsi ini, saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Semoga karya skripsi ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.

Makassar, 31 Juli 2024

Nurhaliza

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENERIMAAN TIM	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	x
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Kegunaan Penelitian.....	8
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	9
A. Penelitian Terdahulu	9
B. Kajian Teori	12
C. Kerangka Pikir	23
D. Fokus Penelitian	24
E. Deskripsi Fokus Penelitian.....	24
BAB III. METODE PENELITIAN	26
A. Waktu dan Lokasi Penelitian	26
B. Jenis dan Tipe Penelitian.....	26
C. Sumber Data.....	26
D. Informasi Penelitian	27
E. Teknik Pengumpulan Data.....	28
F. Teknik Analisis Data.....	29
G. Teknik Pengabsahan Data.....	30
BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN	33
A. Deskripsi Lokasi Penelitian.....	33
B. Kota Cerdas	40
C. Hasil Penelitian	43
D. Pembahasan Penelitian.....	50
BAB V. PENUTUP	57
A. Kesimpulan	57
B. Saran.....	57
DAFTAR PUSTAKA	59
LAMPIRAN	63

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Informan Penelitian.....	28
Tabel 2	Rincian Luas Wilayah Kecamatan di Kota Makassar	35
Tabel 3	Distribusi dan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan.....	39
Tabel 5	Program integritasi Pemerintah Kota Makassar	44
Tabel 6	Program Kolaborasi Pemerintah Kota Makassar	47
Tabel 7	Program Birokrasi Pemerintah Kota Makassar	49
Tabel 8	Tabel Hasil Wawancara.....	50



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Pemetaan Penelitian.....	10
Gambar 2	Kerangka Pikir.....	23
Gambar 3	Peta Wilayah Administrasi Kota Makassar	36
Gambar 4	Peta Sebaran Pulau-Pulau di Kota Makassar	37
Gambar 5	Wawancara dengan Bapak Yamlikh Azikin	64
Gambar 6	Wawancara dengan Bapak A. Zulfitra Dianta	64
Gambar 7	Wawancara dengan Ibu Ivana Mursalin S.E.....	65
Gambar 8	Wawancara dengan Pak Ikhsan.....	65
Gambar 9	Wawancara dengan Pak Muhammad Rezky.....	66



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan Diplomasi Pemerintah Melalui Jejaring Kota Cerdas Untuk Pembangunan Berkelanjutan Di Kota Makassar, yaitu bagaimana Pemerintahan terintegrasi, berkolaborasi, dan Birokrasi yang efisien (*efficient e-governance*). Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam pelayanan dan pemberdayaan masyarakat serta pembangunan . Di era digital yang semakin maju sekarang ini, pemerintah harus lebih sensitif serta tanggap dalam memanfaatkan teknologi yang ada. Begitupula dengan penyelenggara dokumen administrasi publik yang harus selalu memodernisasikan dirinya, menemukan strategi serta pendekatan terhadap masyarakat dengan lebih jitu, serta terus berusaha memperbaharui teori dan instrumentasi agar tidak semakin tertinggal dengan kemajuan jaman. Dalam hal ini salah satu hal yang dapat dilakukan adalah dengan inovasi (Soraya, 2019).

Di zaman yang ditentukan oleh kekuatan globalisasi dan kemajuan teknologi yang cepat, kota-kota di seluruh dunia telah menyadari pentingnya mendorong kolaborasi internasional dan memanfaatkan teknologi inovatif untuk mendorong pembangunan berkelanjutan. Salah satu pendekatan penting yang telah muncul di lanskap perkotaan adalah konsep diplomasi kota, sebuah strategi instrumental yang ditujukan untuk membina kerja sama antar kota dan mengatasi berbagai tantangan urbanisasi. Inti dari perubahan paradigma ini

adalah gagasan inovatif tentang jaringan kota pintar, di mana kota secara strategis memanfaatkan teknologi digital dan solusi berbasis data untuk meningkatkan kualitas hidup penghuninya sambil terus maju dengan inisiatif pembangunan perkotaan yang berkelanjutan (Hasibuan, 2019).

Kota Makassar yang ramai, sebuah pusat kota yang semarak terletak di jantung Indonesia, berdiri sebagai mikrokosmos yang menarik dari tren global menuju urbanisasi. Di dalam susunan perkotaannya yang dinamis terdapat permadani yang rumit dari tantangan sosial-ekonomi dan lingkungan yang memerlukan pendekatan segar dan inovatif untuk memastikan lintasan pertumbuhan yang berkelanjutan. Dalam konteks inilah eksplorasi diplomasi kota melalui lensa jaringan kota pintar sangat menjanjikan. Dengan memanfaatkan kekuatannya yang unik dan bersinergi dengan pusat kota lainnya, Makassar memiliki potensi untuk menggali solusi holistik terhadap tantangan perkotaan yang rumit (Purwanto, 2022).

Diplomasi kota, pada intinya, mewujudkan seni membina hubungan kolaboratif antar kota untuk mengatasi masalah bersama, meningkatkan vitalitas sosial-ekonomi, dan memfasilitasi pertukaran budaya. Pendekatan diplomasi ini melampaui diplomasi tingkat negara tradisional dan menggarisbawahi pentingnya aktor subnasional sebagai pemain penting di arena global (Rahman, 2020).

Munculnya jaringan kota pintar menambah sentuhan futuristik pada praktik lama diplomasi kota. Jaringan ini merupakan ekosistem yang saling terhubung di mana teknologi berbasis data berfungsi sebagai landasan

untuk pengambilan keputusan yang terinformasi, tata kelola yang responsif, dan perencanaan kota yang berkelanjutan. Dengan mengintegrasikan inovasi digital secara mulus ke dalam berbagai aspek kehidupan perkotaan, mulai dari transportasi dan manajemen energi hingga perawatan kesehatan dan pembuangan limbah, jaringan kota pintar bertujuan untuk membentuk kota yang tangguh dan siap menghadapi masa depan (Rosalina, 2014).

Menavigasi Lanskap Kota Makassar, Tantangan dan Peluang Makassar, kota yang kaya akan warisan budaya dan dinamisme ekonomi bergulat dengan berbagai tantangan perkotaan yang beresonansi dengan kota-kota di seluruh dunia. Pertumbuhan populasi yang cepat, tuntutan infrastruktur, degradasi lingkungan, dan kesenjangan sosial-ekonomi memerlukan strategi inovatif untuk pembangunan perkotaan yang berkelanjutan (Hesty, 2020). Potensi diplomasi kota melalui jaringan *smart city* sangat menjanjikan bagi Makassar. Dengan berkolaborasi dengan pusat kota berpikiran maju lainnya, kota ini dapat memanfaatkan gudang global praktik terbaik, kebijakan inovatif, dan solusi berbasis teknologi. Penyerbukan silang ide dan sumber daya ini dapat menyegarkan lanskap kota Makassar dan mengkatalisasi transformasinya menjadi model urbanisasi berkelanjutan (Fathun, 2020).

Dalam lanskap urbanisasi yang terus berkembang, perpaduan diplomasi kota dan jaringan kota pintar muncul sebagai suar harapan bagi kota-kota yang berjuang untuk mencapai pembangunan berkelanjutan. Kasus Makassar mencontohkan potensi sinergi transformatif ini, menawarkan gambaran sekilas ke masa depan di mana kota-kota memanfaatkan kearifan

kolektif dan kecakapan inovatif mereka untuk mewujudkan kehidupan perkotaan yang lebih sejahtera dan harmonis (Rilansari, 2022). Makassar mengarungi perairan pertumbuhan perkotaan yang belum terpetakan, integrasi diplomasi kota dan jaringan kota cerdas berfungsi sebagai pedoman, memandu jalan menuju masa depan di mana pembangunan berkelanjutan bukan hanya aspirasi luhur tetapi kenyataan nyata. Dengan memanfaatkan kekuatan kolaborasi, inovasi, dan teknologi, Makassar memiliki kesempatan untuk mendefinisikan kembali narasi perkotaannya dan menginspirasi era baru diplomasi perkotaan global (Yudi, 2019).

Kota Makassar menuju diplomasi perkotaan yang berkelanjutan terletak pada potensi transformatif teknologi. Jaringan kota pintar berfungsi sebagai saluran di mana data dikumpulkan, dianalisis, dan diubah menjadi wawasan yang dapat ditindaklanjuti yang membentuk kebijakan dan intervensi perkotaan. Pendekatan berbasis data ini memberdayakan perencanaan kota dan pembuat kebijakan untuk membuat keputusan berdasarkan informasi, mengoptimalkan alokasi sumber daya, dan secara proaktif mengatasi tantangan yang muncul (Suwandi, 2022). Misalnya, penerapan sensor IoT (*Internet of Things*) di seluruh kota dapat menghasilkan data real-time tentang kualitas udara, kemacetan lalu lintas, konsumsi energi, dan pengelolaan limbah. Kekayaan informasi ini melengkapi pejabat kota dengan perangkat yang diperlukan untuk mengembangkan strategi bertarget yang mengurangi polusi, merampingkan arus lalu lintas, dan meningkatkan efisiensi energi. Hasilnya adalah kota yang tidak hanya responsif terhadap kebutuhan penghuninya, tetapi

juga berkomitmen untuk meminimalkan jejak ekologisnya (Fathun, 2022).

Di luar implikasi lingkungannya, perkawinan jaringan kota pintar dan pembangunan berkelanjutan menjanjikan signifikan untuk memperkuat ketahanan ekonomi. Makassar dapat memanfaatkan teknologi digital untuk mendorong inovasi, menarik investasi, dan menciptakan ekosistem kewirausahaan yang berkembang. Dengan menumbuhkan lingkungan yang kondusif untuk kemajuan teknologi, kota ini dapat memposisikan dirinya sebagai magnet bagi bisnis dan perusahaan baru yang paham teknologi sehingga mendiversifikasi basis ekonominya dan meningkatkan daya saing globalnya (Alamsyah, 2022).

Selain itu, integrasi teknologi cerdas dapat meningkatkan efisiensi layanan publik, berkontribusi pada lingkungan bisnis yang lebih menguntungkan. Sistem transportasi umum yang disederhanakan, pengelolaan limbah yang dioptimalkan, dan infrastruktur digital yang mulus dapat diterjemahkan menjadi pengurangan biaya operasional untuk bisnis dan peningkatan kualitas hidup penduduk. Siklus pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sosial yang baik ini menggarisbawahi potensi transformatif dari diplomasi perkotaan yang berkelanjutan (Pangestu, 2022).

Keberhasilan setiap upaya pembangunan berkelanjutan bergantung pada partisipasi aktif masyarakat, sebagai mana dalam PP NOMOR 59 Tahun 2017 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals yang selanjutnya disingkat TPB adalah dokumen yang memuat tujuan dan sasaran global tahun 2016 sampai tahun 2030(PP NOMOR 59 Tahun 2017).

Jaringan kota pintar menawarkan sarana untuk mendorong tata kelola inklusif dengan mendemokratisasi akses ke informasi dan memberdayakan penduduk untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan. Dengan memanfaatkan platform digital, Makassar dapat menjembatani kesenjangan antara lembaga pemerintah dan warga negara, memungkinkan umpan balik secara *real-time*, komunikasi yang transparan, dan pemecahan masalah secara kolaboratif (Bangun & Suwandi, 2022). Misalnya, inisiatif penganggaran partisipatif dapat difasilitasi melalui platform online, yang memungkinkan warga menyuarakan preferensi mereka dan mengalokasikan sumber daya untuk proyek-proyek prioritas. Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan keterlibatan masyarakat tetapi juga memastikan bahwa prakarsa pembangunan sejalan dengan kebutuhan dan aspirasi asli masyarakat. Dengan cara ini, jaringan kota pintar menjadi saluran untuk memelihara rasa memiliki dan tanggung jawab bersama untuk masa depan kota yang berkelanjutan (Mahesa, 2019).

Perjalanan menuju diplomasi kota melalui jaringan kota pintar merupakan upaya mendalam yang berpotensi membentuk kembali lanskap kota Makassar dan meninggalkan jejak yang tak terhapuskan pada lintasan pembangunannya. Perpaduan diplomasi dan teknologi menjanjikan untuk mengkatalisasi pertumbuhan yang berkelanjutan, meningkatkan kualitas hidup, dan mendorong koeksistensi yang harmonis antara penduduk kota yang beragam dan alam sekitarnya (Nastjuka, 2022). Konvergensi diplomasi kota dan jaringan smart city menghadirkan momen penting bagi Makassar untuk mendefinisikan kembali narasi urbannya dan menyiapkan panggung untuk

masa depan yang berkelanjutan dan sejahtera. Ketika teknologi terus berkembang dan cakrawala baru muncul, Makassar memiliki kesempatan untuk memanfaatkan kekuatan diplomasi dan inovasi untuk membuka jalan bagi masa depan di mana kota berkembang, masyarakat berkembang, dan janji pembangunan berkelanjutan menjadi kenyataan yang bertahan lama (Tri, 2020).

Tuntutan Zaman menghendaki inovasi Pemerintah Melalui Jejaring Kota cerdas untuk pembangunan berkelanjutan, di Di Kota telah berjalan *sombere smrat city* yang merupakan perwujudan dari nilai-nilai luhur budaya etnis “Bugis Makassar” yang ramah tamah dan santun serta bersahabat dan didukung pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam pelayanan dan pemberdayaan masyarakat serta pembangunan. Sombere’ berkaitan dengan *Heartware* atau “Perangkat Hati”, sedangkan *Smart City* berkaitan dengan *Hardware* dan *Software* atau “Perangkat Keras” dan “Perangkat Lunak”. Diharapkan dengan Sombere’ dan *Smart City* menjadikan Makassar kota cerdas yang berbasis teknologi serta berkarakter budaya lokal. Tentunya dalam penerapannya sangat membutuhkan sumber daya aparatur yang profesional dan mempunyai kapasitas yang memadai.

Dengan munculnya program Kota pintar maka kita harus mengetahui mengenai langkah apa yang dilakukan oleh Pemerintah dalam menerapkan dan menjalankan program tersebut.

Dalam penelitian ini menggunakan indikator /teori Prof. Dr. Rudolf Giffinger dimana terdapat beberapa poin dan dalam penelitian ini terfokus pada

poin *Smart Governance*.

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan yang telah dikemukakan, adapun penelitian ini berjudul “**Diplomasi Pemerintah Melalui Jejaring Kota Cerdas Untuk Pembangunan Berkelanjutan Di Kota Makassar**”. Dengan program kota cerdas yang dilakukan oleh Pemerintah ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas pembangunan berkelanjutan dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap kinerja Pemerintah Kota Makassar.

B. Rumusan Masalah

Bagaimana Pemerintah Kota Makassar menjalankan program Kota cerdas dalam meningkatkan pembangunan berkelanjutan?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui cara Pemerintah Kota Makassar dalam menjalankan program Kota Makassar.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat bagi penulis

Diharapkan bahwa hasil penelitian ini dapat menambah dan memperluas wawasan berfikir bagi penulis tentang bentuk tata kelola pelayanan publik dalam penelitian ini serta mempelajari berbagai konsep dan teori-teori dalam melayani masyarakat dengan baik.

2. Manfaat bagi akademisi

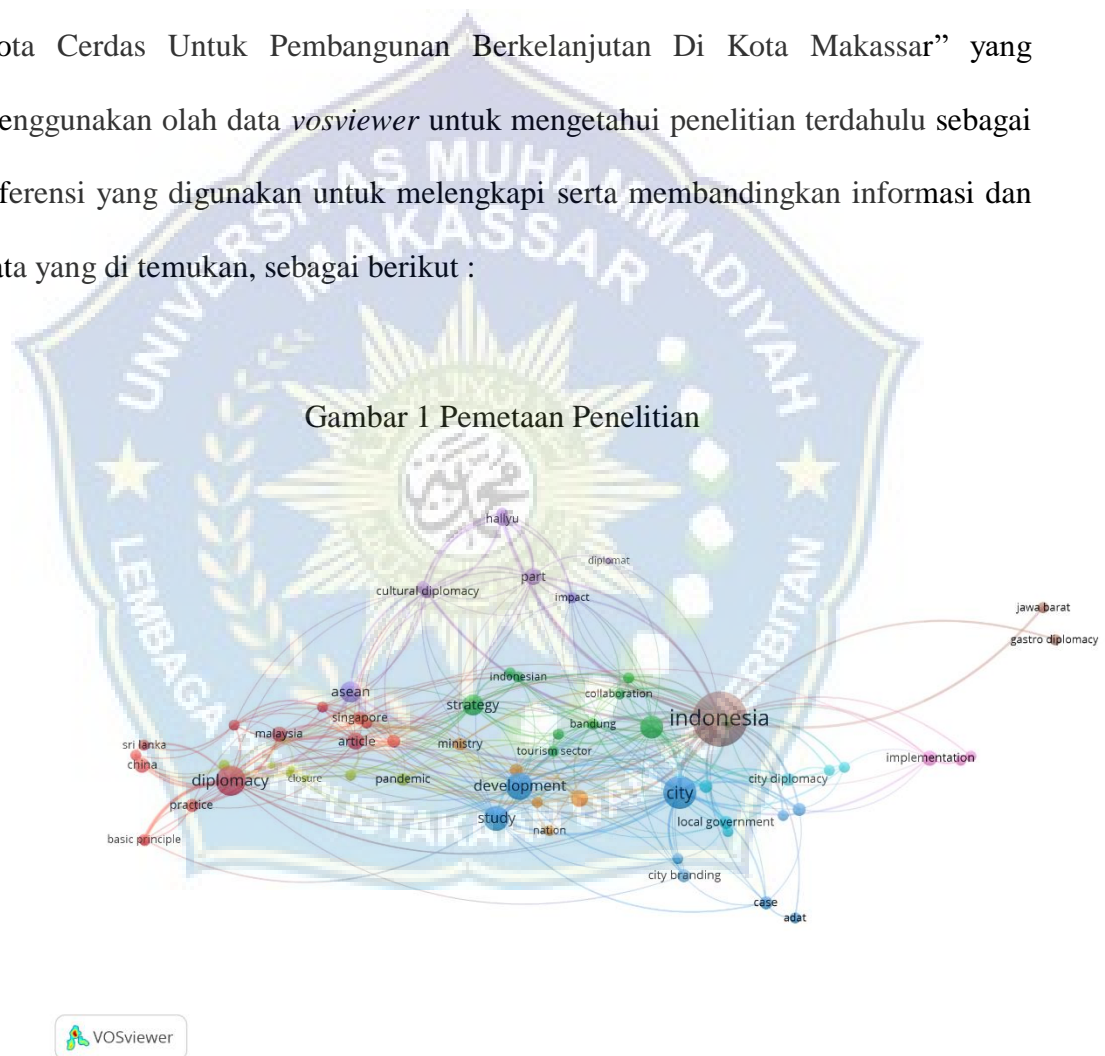
Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sumber atau landasan terhadap pengembangan ataupun pembuatan dalam penelitian yang sama.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu sangat penting untuk mendukung serta menjadi tolak ukur sebuah penelitian baru. Penelitian berjudul “Diplomasi Kota Melalui Jejaring Kota Cerdas Untuk Pembangunan Berkelanjutan Di Kota Makassar” yang menggunakan olah data *vosviewer* untuk mengetahui penelitian terdahulu sebagai referensi yang digunakan untuk melengkapi serta membandingkan informasi dan data yang di temukan, sebagai berikut :



Sumber : dikelola menggunakan *VOSviewer* 2023

Berdasarkan hasil penelusuran kepustakaan menggunakan *publish or perish* ditemukan 66 artikel jurnal dengan rentan waktu 2013-2023 yang berkaitan erat dengan kata kunci Diplomasi; Kota Cerdas; Pembangunan Berkelanjutan (Putra & Yulindrasari, 2023). Artikel-artikel tersebut kemudian dikelola menggunakan *Vosviewer* untuk menentukan posisi proyek penelitian peneliti. Dari hasil olahan data *Vosviewer* ditemukan Dalam penelusuran kepustakaan menggunakan platform "Publish or Perish," ditemukan sebanyak (26) artikel yang berkaitan dengan Pembangunan Kota berkelanjutan 2013-2023 (Harakan, 2023). Artikel-artikel tersebut kemudian telah dianalisis dan dimasukkan ke dalam aplikasi *Vosviewer* guna mengidentifikasi fokus, lokasi, dan objek penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Beberapa persamaan dan perbedaan dapat diidentifikasi antara penelitian-penelitian terdahulu ini dengan penelitian yang akan dilakukan mengenai pembangunan berkelanjutan di kota makassar dengan menggunakan jejaring diplomsia (Fajari, 2021).

Adapun persamaannya adalah sebagai berikut:

- a. Fokus Penelitian: Penelitian terdahulu dan penelitian yang akan dilakukan sama-sama berfokus pada pembangunan berkelanjutan (Wirawan, 2018).
- b. Periode Penelitian: Kedua penelitian memiliki periode penelitian yang sejalan, yaitu dari tahun 2013 hingga 2023, menunjukkan bahwa isu ini relevan dan kontinu dalam kurun waktu tersebut (Harakan, 2023).

Adapun perbedaannya adalah sebagai berikut:

Metode penelitian: penelitian yang dilakukan dapat bervariasi dalam metode penelitian yang digunakan, seperti penelitian kuantitatif dengan pendekatan statistik atau penelitian kualitatif dengan fokus pada wawancara modern (Nurauliana et al., 2023).

Dengan membandingkan persamaan dan perbedaan antara penelitian terdahulu dan penelitian yang akan dilakukan, maka peneliti tertarik memahami bagaimana pengaruh diplomasi kota dalam pembangunan berkelanjutan.

B. Kajian Teori

1. Konsep Diplomasi

Diplomasi merupakan media yang sangat berperan dalam melaksanakan kepentingan suatu Negara dalam menjalin hubungan bilateral ataupun multilateral. Istilah diplomasi sering kali disamakan dengan hubungan internasional atau masalah-masalah dunia, hubungan-hubungan luar negeri komunikasi dan negosiasi. Diplomasi merupakan proses politik memelihara kebijakan luar negeri untuk mempengaruhi kebijakan dan sikap pemerintah Negara lain (Widiansyah Anugerah, 2023).

Diplomasi adalah seni dalam bernegosiasi yang dilakukan oleh seorang diplomat dengan pihak lain untuk mencapai tujuan tertentu. Arti diplomasi dapat juga di definisikan sebagai cara untuk mencapai suatu pesan yang tujuan khusus melalui seorang diplomat dalam perundingan, Diplomasi sangat erat hubungannya dalam kegiatan politik luar negeri atau hubungan internasional dengan Negara lain. diplomasi secara sederhana dapat di definisikan sebagai proses politik yang

dengannya entitas politik, umumnya Negara, melakukan hubungan-hubungan luar negeri satu sama lain dalam hubungan internasional (Wijatmadja, 2016).

Diplomasi merupakan salah satu instrumen penting dalam pelaksanaan kepentingan nasional suatu negara. Diplomasi bagaikan alat utama dalam pencapaian kepentingan nasional yang berkaitan dengan negara lain atau organisasi internasional(Nurika, 2017). Melalui diplomasi ini lah sebuah negara dapat membangun citra tentang dirinya. Dalam hubungan antar negara, pada umumnya diplomasi diterapkan sejak tingkat paling awal sebuah negara hendak melakukan hubungan bilateral dengan negara lain hingga keduanya mengembangkan hubungan selanjutnya. Menurut G.R. Berridge, konsep diplomasi merujuk pada aktivitas politik yang dilakukan oleh para aktor untuk mengejar tujuannya dan mempertahankan kepentingannya melalui negosiasi, tanpa menggunakan kekerasan, propaganda, atau hukum (Nurika, 2017).

Diplomasi terdiri dari komunikasi antar sejumlah pihak yang didesain untuk mencapai kesepakatan. Sedangkan menurut KM Panikkar, diplomasi, dalam hubungannya dengan politik internasional, adalah seni mengedepankan kepentingan suatu negara dalam hubungannya dengan negara lain (Widiansyah Anugerah, 2023).

1. Prinsip Diplomasi Kota

Secara tradisional prinsip-prinsip dasar dari paradiplomasi ini tidak jauh berbeda dengan definisi diplomasi sendiri yang berdasarkan pada tiga prinsip dasar. Pertama, diselenggarakan dalam kerangka menjalin hubungan perdamaian: kedua, saling mengakui terhadap kedaulatan negaranya masing-masing: ketiga,

menjalin hubungan persahabatan dalam jangka waktu yang lama (Nur & Sudirman, 2016).

2. Bentuk-Bentuk Diplomasi

Diplomasi merupakan kegiatan yang dilakukan antara dua negara atau lebih untuk mencapai suatu kesepakatan. Bentuk-bentuk diplomasi dapat menjadi sangat beragam, dari perundingan damai hingga kerjasama politik (Widiansyah Anugerah, 2023). Di bawah ini adalah beberapa bentuk diplomasi yang paling umum:

1) Diplomasi Perundingan

Diplomasi perundingan dilakukan dalam upaya mencapai kesepakatan dari konflik atau masalah yang terjadi. Perwakilan dari setiap negara akan bertemu secara formal untuk membahas masalah dan mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Diplomasi perundingan dapat melibatkan topik-topik politik, ekonomi, lingkungan, dan lain sebagainya.

2) Diplomasi Publik

Diplomasi publik adalah upaya diplomasi yang difokuskan pada pendapat publik. Dalam rangka meningkatkan citra suatu negara, dipraktikkan upaya diplomasi untuk menarik perhatian publik internasional agar memperhatikan prestasi suatu negara. Bisa dengan cara bekerja sama dengan media masa dalam dan luar negeri (Nur & Sudirman, 2016).

3) Diplomasi Ekonomi

Diplomasi ekonomi dilakukan dengan tujuan mengembangkan dan memperkokoh pertukaran ekonomi antara dua negara. Dalam hal ini, tujuannya

dapat berupa peningkatan perdagangan, pemahaman investasi, politik ekonomi, mempromosikan produk-produk bangsa, teknik transfer, dan sebagainya.

2. Konsep dan Teori *Smart City*

Smart City (Kota Pintar) sebuah pendekatan yang luas (Besar & Sumatera, 2019), terintegrasi dalam meningkatkan efisiensi pengoperasian sebuah kota, meningkatkan kualitas hidup penduduknya, dan menumbuhkan ekonomi daerahnya. Cohen lebih jauh mendefinisikan *Smart City* dengan pembobotan aspek lingkungan menjadi *Smart City* menggunakan ICT secara pintar dan efisien dalam menggunakan berbagai sumber daya, menghasilkan penghematan biaya dan energi, meningkatkan pelayanan dan kualitas hidup, serta mengurangi jejak lingkungan semuanya mendukung ke dalam inovasi dan ekonomi ramah lingkungan (Cohen Boyd, 2013)

Kota cerdas (*smart city*) didefinisikan sebagai kota yang mampu menggunakan SDM, media sosial, dan infrastruktur telekomunikasi modern untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan kualitas kehidupan yang tinggi, dengan manajemen sumber daya yang bijaksana melalui pemerintahan berbasis partisipasi masyarakat (Caraglu, 2013). *Smart city* merupakan hasil dari pengembangan pengetahuan yang intensif dan strategi kreatif dalam peningkatan kualitas sosial, ekonomi, ekologi, daya kompetitif kota. Kemunculan *smart city* merupakan hasil dari gabungan modal sumber daya manusia (contohnya angkatan kerja terdidik), modal infrastruktur (contohnya fasilitas ekonomi yang berteknologi tinggi), modal pengelolaan gedung. Dengan begitu dapat

mengoptimalkan sumber daya yang dimilikinya serta merencanakan pencegahannya. Kegiatan pemeliharaan dan keamanan dipercayakan kepada penduduknya. *Smart city* dapat menghubungkan infrastruktur fisik, infrastruktur IT, infrastruktur sosial dan bisnis infrastruktur untuk meningkatkan kecerdasan kota (Abdurrozzak, 2019).

Smart city membuat kota lebih efisien dan layak huni. Penggunaan *smart computing* untuk membuat *smart city* dan fasilitasnya meliputi pendidikan, kesehatan, keselamatan umum, transportasi yang lebih cerdas, saling berhubungan dan efisien (Abdurrozzak, 2019).

1. Strategi Awal Dalam Mendukung Terwujudnya Kota Cerdas

Untuk mewujudkan sebuah kota yang cerdas, maka masing-masing Pemerintah Daerah terlebih dulu harus menetapkan visi, misi, strategi, sasaran dan program pembangunan yang menunjukkan sebuah kota cerdas yaitu menjadikan kotanya untuk menjadi Kota Metropolitan yang Berdaya Saing, Nyaman, Peduli dan sejahtera (Sumatera, 2022). Kota Metropolitan adalah kota besar yang sangat penting. Ini adalah tempat di mana pemerintahan, politik, perdagangan, dan budaya berkembang pesat. Kota ini juga harus nyaman dan aman bagi semua orang, tanpa memandang latar belakang mereka. Pemerintahnya harus peduli dan memberikan pelayanan yang baik kepada warganya. Kota ini juga harus bisa memenuhi kebutuhan dasar semua orang, seperti pendidikan, kesehatan, makanan, dan tempat tinggal, serta mengurangi kemiskinan dan pengangguran. Ini membuat semua orang bahagia dan hidup dengan baik (Abdurrozzak, 2019).

a. Indikator *smart city*

Ada beberapa indikator atau faktor-faktor pendukung dalam mewujudkan kota cerdas menurut (Chusna, 2023) yaitu:

1) *Smart Economy* (Ekonomi Cerdas)

Kualitas yang menghasilkan suatu inovasi dan mampu menghadapi persaingan. Semakin tinggi inovasi-inovasi baru yang ditingkatkan maka akan menambah peluang usaha baru dan meningkatkan persaingan pasar usaha/modal. *Smart Economy*, juga diartikan sebuah kota cerdas yang memiliki tingkat perekonomian yang baik, pemanfaatan sumber daya atau potensi alam yang dimiliki oleh kota secara efisien dan efektif. Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator untuk mengukur tingkat pembangunan di suatu daerah pada periode waktu tertentu sehingga dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat secara umum.

2) *Smart Mobility* (Mobilitas Cerdas)

Kemampuan untuk mengembangkan transportasi dan pembangunan infrastruktur sebagai bentuk penguatan sistem perencanaan infrastruktur kota. Pengelolaan infrastruktur kota yang dikembangkan di masa depan merupakan sebuah sistem pengelolaan terpadu dan diorientasikan untuk menjamin keberpihakan pada kepentingan publik.

3) *Smart Environment* (Lingkungan Cerdas)

Keberlanjutan dan sumber daya, lingkungan cerdas itu berarti lingkungan yang bisa memberikan kenyamanan, keberlanjutan sumber daya, keindahan fisik maupun non fisik, visual maupun tidak, bagi masyarakat dan publik lingkungan

yang bersih tertata, RTH yang stabil merupakan contoh dari penerapan lingkungan pintar.

4) *Smart People* (Masyarakat Cerdas)

Kreativitas dan modal sosial, pembangunan senantiasa membutuhkan modal, baik modal ekonomi (*economic capital*), modal usaha (*human capital*), maupun modal sosial (*social capital*). Kemudahan akses modal dan pelatihan-pelatihan bagi UMKM dapat meningkatkan kemampuan keterampilan mereka dalam mengembangkan usahanya. Modal sosial termasuk elemen-elemen seperti kepercayaan, gotong-royong, toleransi, penghargaan, saling memberi dan saling menerima serta kolaborasi sosial memiliki pengaruh yang besar terhadap pertumbuhan ekonomi melalui berbagai mekanisme seperti meningkatnya rasa tanggungjawab terhadap kepentingan publik, meluasnya partisipasi dalam proses demokrasi, menguatnya keserasian masyarakat dan menurunnya tingkat kejahatan.

5) *Smart Living* (Hidup Cerdas atau Kualitas Hidup)

Berbudaya berarti bahwa manusia memiliki kualitas hidup yang terukur (budaya). Kualitas hidup tersebut bersifat dinamis, dalam artian selalu berusaha memperbaiki dirinya sendiri. Pencapaian budaya pada manusia, secara langsung maupun tidak langsung merupakan hasil dari pendidikan. Maka kualitas pendidikan yang baik adalah jaminan atas kualitas budaya, dan atau budaya yang berkualitas merupakan hasil dari pendidikan yang berkualitas.

6) *Smart Governance* (Pemerintahan yang Cerdas)

Kunci utama keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan adalah *Good Governance*, yang merupakan paradigma, sistem dan proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang mengindahkan prinsip-prinsip supremasi hukum, kemanusiaan, keadilan, demokrasi, partisipasi, transparansi, profesionalitas, dan akuntabilitas ditambah dengan komitmen terhadap tegaknya nilai dan prinsip desentralisasi, daya guna, hasil guna, pemerintahan yang bersih, bertanggung jawab dan berdaya saing.

3. Konsep Pembangunan Berkelanjutan

Pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang memenuhi kebutuhan generasi saat ini tanpa mengurangi kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka. Untuk mencapai tujuan tersebut dibutuhkan strategi pelaksanaannya, diantaranya ada empat hal yang perlu diperhatikan yaitu; pemerataan, partisipasi, keanekaragaman, integrasi, dan perspektif jangka panjang yang diikuti pendekatan secara ideal. Pembangunan berkelanjutan mencakup berbagai aspek kehidupan yaitu; keberlanjutan ekologis, ekonomi, sosial budaya, politik, serta pertahanan dan keamanan.

Pembangunan berkelanjutan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi manusia. Pembangunan yang berkelanjutan pada hakekatnya ditujukan untuk mencari pemerataan pembangunan antar generasi pada masa kini maupun masa mendatang (Jaya, 2014). pembangunan yang pada dasarnya lebih berorientasi ekonomi dapat diukur keberlanjutannya berdasarkan tiga kriteria yaitu:

1. Tidak ada pemborosan penggunaan sumber daya alam atau *depletion of natural resource*.
2. Tidak ada polusi dan dampak lingkungan lainnya.
3. Kegiatan harus dapat meningkatkan *usable resource* ataupun *replacable resource*.

Sutamihardja dalam (Rahadian, 2016) Dalam konsep pembangunan berkelanjutan, tabrakan kebijakan yang memungkinkan dapat terjadi antara kebutuhan menggali sumberdaya alam untuk memerangi kemiskinan dan kebutuhan mencegah terjadinya degradasi lingkungan perlu dihindari serta sejauh mungkin dapat berjalan secara berimbang. Pembangunan berkelanjutan juga mengharuskan pemenuhan kebutuhan dasar bagi masyarakat dan adanya kesempatan yang luas kepada warga masyarakat untuk mengejar cita-cita akan kehidupan yang lebih baik dengan tanpa mengorbankan generasi yang akan datang. Pengembangan konsep pembangunan yang berkelanjutan perlu mempertimbangkan kebutuhan yang wajar secara sosial dan kultural, menyebarluaskan nilai-nilai yang menciptakan standar konsumsi yang berbeda dalam batas kemampuan lingkungan, serta secara wajar semua orang mampu mencita-citakannya. Namun, Memang diakui bahwa konsep keberlanjutan merupakan konsep yang sederhana namun kompleks, sehingga pengertian keberlanjutanpun sangat multidimensi dan multi-interpretasi (Rahadian, 2016).

Konsep pembangunan berkelanjutan yang dimaknai sebagai pembangunan untuk masa kini dan yang tidak memerlukan kompromi generasi yang akan datang muncul pada pertemuan bangsa-bangsa di Norwegia yang diketuai oleh Perdana

Menteri Norwegia Gro Harlem Brundtland pada tahun 1987. Di saat itulah seolah-olah terjadi revolusi ke 2 (dua) di bidang pembangunan nasional yang menyatakan bahwa pembangunan ekonomi tidak semata-mata merusak lingkungan, tetapi justru pembangunan ekonomi dan pembangunan lingkungan dapat bersinergi satu sama lain (Suparmoko, 2020).

Ada dua definisi tentang pembangunan berkelanjutan; yaitu pembangunan berkelanjutan dalam arti kuat (*strong definition*) dan berkelanjutan dalam arti lunak (*weak definition*). Berkelanjutan dalam arti kuat atau keras menghendaki agar nilai semua modal pembangunan; yaitu nilai modal manusia (*human capital*) ditambah nilai ekosistem sebagai modal alami (*natural capital*) ditambah lagi dengan modal buatan manusia (*human made capital*) tetap atau tidak mengalami penurunan. Sedangkan dalam arti lunak pembangunan berkelanjutan memungkinkan adanya substitusi di antara ketiga jenis modal pembangunan; utamanya nilai modal alami kalau berkurang dapat diimbangi dengan peningkatan nilai modal manusia dan modal buatan manusia. Sebagai contoh seandainya terjadi penurunan jumlah modal alami seperti minyak bumi dan batu bara yang selalu dieksploitasi atau diambil dari bumi kita, maka dikehendaki agar nilai modal manusia dan atau nilai modal buatan manusia meningkat yang dibiayai dengan memanfaatkan modal alami yang diambil dari alam di daerah yang bersangkutan (Suparmoko, 2020).

Pada perkembangannya, perkembangan berkelanjutan juga ditujukan untuk mencari strategi inovatif untuk mengubah struktur kelembagaan dan kebijakan serta perubahan indikator-indikator untuk menilai efektifitasnya, dalam

arti untuk mengetahui apakah suatu kegiatan, program ataupun kebijakan dapat dikatakan berkelanjutan (*sustainable*) atau tidak berkelanjutan (*unsustainable*). Penyusunan indikator pembangunan berkelanjutan di tingkat nasional merupakan hal yang banyak dijumpai tetapi sangat langka dijumpai di tingkat kota di Indonesia. Pemerintah kota Semarang merupakan salah satu kota yang berupaya mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan sebagai indikator pembangunan kotanya (Setiadi et al., 2008).



C. Kerangka Pikir

Gambar 2 : Kerangka Pikir



D. Fokus penelitian

Penelitian ini akan difokuskan pada “Diplomasi Pemerintah Melalui Jejaring Kota Cerdas Untuk Pembangunan Berkelanjutan Di Kota Makassar”.

E. Deskripsi Fokus Penelitian

Fokus penelitian merupakan pemuatan konsentrasi terhadap tujuan penelitian yang sedang dilakukan. Fokus penelitian harus di uraikan sesuai dengan kerangka pikir untuk memudahkan peneliti sebelum melakukan observasi.

- a. *Smart Economy* (Ekonomi Cerdas) Ekonomi cerdas adalah tentang inovasi dan persaingan yang tinggi. Semakin banyak inovasi, semakin banyak peluang usaha baru dan persaingan pasar yang meningkat. Ini juga berarti memanfaatkan sumber daya alam secara efisien dan efektif untuk meningkatkan perekonomian kota dan kesejahteraan masyarakat.
- b. *Smart Mobility* (Mobilitas Cerdas) Mobilitas cerdas adalah kemampuan untuk mengembangkan transportasi dan infrastruktur kota dengan perencanaan yang baik. Ini berfokus pada pengelolaan infrastruktur kota yang mengutamakan kepentingan publik.
- c. *Smart Environment* (Lingkungan Cerdas) Lingkungan cerdas adalah tentang menciptakan lingkungan yang nyaman, berkelanjutan, dan indah bagi masyarakat. Ini mencakup lingkungan yang bersih dan tata kota yang baik, seperti taman kota yang terawat.
- d. *Smart People* (Masyarakat Cerdas) Masyarakat cerdas mengandalkan kreativitas dan modal sosial. Fokusnya adalah memberikan akses mudah ke modal dan pelatihan bagi usaha kecil dan menumbuhkan elemen-elemen sosial seperti kepercayaan dan kolaborasi.
- e. *Smart Living* (Hidup Cerdas atau Kualitas Hidup) Hidup cerdas adalah tentang meningkatkan kualitas hidup melalui pendidikan yang berkualitas. Kualitas hidup yang baik bergantung pada pendidikan yang baik, dan pendidikan yang baik menciptakan budaya yang berkualitas.

f. **Smart Governance (Pemerintahan yang Cerdas)** Pemerintahan yang cerdas berarti menerapkan *Good Governance*, dengan prinsip-prinsip seperti supremasi hukum, kemanusiaan, keadilan, demokrasi, transparansi, dan akuntabilitas. Ini juga mencakup komitmen pada desentralisasi, pemerintahan bersih, dan profesionalitas dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Dari beberapa indikator menurut Prof. Dr. Rudolf Giffinger, maka dalam penelitian ini kami fokus pada *Smart Governance*. Dalam komponen smart city Kota Makassar pada *Smart Governance* terdapat 3 garis besar yang juga akan menjadi Fokus dari penelitian yang akan diteliti oleh peneliti.

1. Pemerintahan Terintegrasi

Integrasi adalah salah satu bentuk kualitas terpenting yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Integrasi adalah suatu konsep yang berkaitan dengan perilaku, nilai, metode, sarana, prinsip, harapan, dan keterpaduan berbagai hasil. Orang yang memiliki integrasi berarti memiliki kepribadian yang jujur dan kuat. Integritas sendiri berasal dari bahasa latin “integrate” yang artinya seperti berikut ini:

- Sikap tegas untuk tidak ingin korupsi, berpegang teguh pada prinsip, dan menjadi dasar untuk berhubungan dengan diri sendiri sebagai nilai moral
- Kualitas, sifat, atau kondisi yang menunjukkan satu kesatuan yang utuh memiliki potensi dan kemampuan untuk memancarkan otoritas, kewibawaan, dan kejujuran

Kejujuran dalam hal ini bukan hanya omongan, pemanis retorika, tapi juga tindakan. Jika dimulai dengan kejujuran, kredibilitas, dan banyak akhlak mulia lainnya, maka karakter inilah yang sangat dibutuhkan pemimpin saat ini dan selamanya. Karakter agung ini tentu akan bermuara pada manusia pilihan Al Mustafa Muhammad SAW sebagai penyempurna karakter manusia.

Salah satu bentuk integrasi pribadi akan terlihat percaya diri dan elegan serta tidak mudah terpengaruh oleh sesuatu hanya untuk melewati kegembiraan atau kesenangan sesaat. Seseorang yang tulus lebih berhasil ketika mereka menjadi pemimpin, baik formal maupun informal.

2. Kolaborasi

Menurut KBBI Kolaborasi adalah sebuah kata yang mengandung arti perbuatan atau kerjasama dengan siapa saja. Menurut Chairul Saleh dalam Modul Konsep, Pengertian, dan Tujuan Kolaborasi, ada banyak pengertian yang menjelaskan kolaborasi. Kolaborasi berasal dari kata *co* dan *labor* yang berarti 'penyatuan tenaga' atau 'peningkatan kemampuan untuk meraih tujuan yang telah disepakati bersama-sama. Kata kolaborasi cenderung digunakan ketika proses penyelesaian kerja melalui lintas batas, sektor, dan hubungan.

3. Birokrasi Yang Efisien (*Efficient E-Governance*)

Pemerintah dan seluruh aparatur yang dikenal dengan birokrasi memiliki peranan yang cenderung dominan dalam menentukan kebijakan, sehingga birokrasi memiliki peran dalam menentukan proses administrasi dalam mewujudkan tujuan pembangunan. (Dedeng Yoesoef Maolani et al., 2022)

Menurut Bintoro Tjokroamidjojo (1984), birokrasi dimaksudkan untuk mengorganisasi secara teratur suatu pekerjaan yang harus dilakukan oleh banyak orang. Dengan demikian, tujuan dari adanya birokrasi agar pekerjaan dapat diselesaikan dengan cepat dan terorganisasi.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

Waktu penelitian dilakukan kurang lebih selama 2 (dua) bulan setelah adanya surat izin penelitian. Lokasi penelitian berada di Kota Makassar. Adapun alasan pemilihan lokasi penelitian ini adalah untuk mengetahui lebih jelas terkait Diplomasi Pemerintah Melalui Jejaring Kota Cerdas Untuk Pembangunan Berkelanjutan Di Kota Makassar.

B. Jenis Penelitian Dan Tipe Penelitian

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif yang bertujuan untuk memperoleh kebenaran pengetahuan yang bersifat ilmiah, melalui prosedur yang telah ditetapkan. Dalam penelitian kualitatif data yang dikumpulkan berasal dari hasil wawancara, observasi secara langsung, catatan resmi lainnya. Tipe penelitian bersifat deskriptif kualitatif yaitu memberikan gambaran dan melukiskan keadaan dilokasi penelitian berdasarkan fakta yang ada dilokasi penelitian. Penelitian ini akan menjelaskan tentang diplomasi pemerintah melalui jejaring kota cerdas untuk pembangunan berkelanjutan di Kota Makassar.

C. Sumber Data

Sumber data merupakan tempat dimana peneliti akan memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian berlangsung. Adapun sumber data penelitian ini yaitu:

1. Data Primer

Data primer adalah asal data pokok yang dipakai pada penelitian buat bisa menarik kabar yang akurat. Data primer sangat menentukan keakuratan asal informasi atau data yang diperoleh karena melalui data primer seluruh informasi yang krusial diperoleh guna menarik suatu konklusi dan menjawab problem yang muncul dalam pada penelitian. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti oleh beberapa narasumber atau informan penelitian untuk mendapatkan hasil penelitian yang akurat.

2. Data sekunder

Data sekunder merupakan sumber data pendukung sebab berisi dengan informasi pendukung yang bersifat sebagai informasi tambahan atau pendukung dari data primer. Meskipun sebagai sumber pendukung tetapi data sekunder juga tidak boleh dianggap tidak penting, karena tanpa adanya data sekunder data primer akan patut dipertanyakan keabsahannya.

D. Informan Penelitian

Informan penelitian adalah narasumber atau orang yang di mintai keterangan berkaitan dengan penelitian yang di laksanakan. Informan penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu cara penentuan informan dengan tujuan tertentu dan di pilih dari orang-orang yang mengetahui pokok permasalahan peneliti. Dimana informan ini di harapkan memberikan data secara obyektif, netral dan dapat di pertanggung jawabkan. Adapun informan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

Tabel 1.1

Informan dalam Penelitian

No.	Nama	Jabatan
1.	A. Zulfitra dianta, S.IP, MA, MPP	Kepala Bagian Kerja Sama Pemerintah Kota Makassar
2.	Yamlikh Azikin	Bagian Analisis Sistem Informasi Badan Perencanaan Dan Pembangunan Daerah Kota Makassar
3.	Pak Ikhsan	Bagian Perencana Ahli Madya BAPPEDA
4.	Ivana Mursalin,S.E	Kasubag Perencanaan BAPPEDA Kota Makassar
5.	Muhammad Rezky, S. Pd., M. Kom	Bidang Aptika Kominfo

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu dengan cara menggunakan teknik observasi, wawancara, dokumentasi.

1. Observasi

Observasi merupakan metode pengumpulan data yang peneliti lakukan melalui pengamatan baik secara langsung maupun tidak langsung. Dilakukan observasi guna untuk mendapatkan data terkait keadaan yang sebenarnya terjadi dilapangan., menjawab pertanyaan-pertanyaan, membantu mengerti perilaku manusia, dan melakukan evaluasi. Sehingga observasi dilakukan untuk mengetahui kondisi sosial ekonomi, kebudayaan, keadaan masyarakat.

2. Wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh penjelasan untuk mengumpulkan informasi dengan menggunakan cara tanya jawab dengan bertatap muka maupun dengan tidak bertatap muka (melalui media komunikasi) antara orang yang mewawancarai dengan orang yang diwawancarai. Wawancara merupakan kegiatan untuk mendapatkan informasi secara mendalam tentang sebuah isu atau tema yang diangkat dalam penelitian. Dengan menggunakan metode wawancara secara mendalam peneliti bisa mendapatkan gambaran yang lebih jelas guna mempermudah dalam menganalisis data selanjutnya. Wawancara ini dilakukan dengan pedoman wawancara yang telah dibuat peneliti. Hal ini dimaksudkan agar pertanyaan yang diajukan oleh peneliti dapat terarah dan juga mendalam.

3. Dokumentasi

Teknik dokumentasi ini di gunakan untuk melengkapi teknik observasi dan wawancara sekaligus menambah keakuratan, kebenaran data atau informasi yang di kumpulkan dari bahan-bahan dokumentasi yang ada di lapangan serta dapat di jadikan bahan dalam pengecekan keabsahan data.

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik analisis data kualitatif dengan menganalisis data yang telah diperoleh dari lapangan. Adapun Langkah-Langkah dengan prosedur tahapan-tahapan berikut:

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan langkah yang dilakukan dengan memilih data dan

fokus kepada data yang memang betul-betul dibutuhkan sebagai data yang utama dan data yang sifatnya sebagai pelengkap saja.

2. Penyajian Data

Dari data yang diperoleh dilapangan kemudian antara mana yang dibutuhkan maupun yang tidak dibutuhkan kemudian melakukan pengelompokan dan diberikan batasan masalah.

3. Penarikan Kesimpulan

Setelah dilakukan penyajian data maka dilakukan kesimpulan awal. Penarikan kesimpulan ini dilakukan setelah penelitian. Pada proses pengumpulan data peneliti berusaha melakukan analisis dan makna terhadap data yang sudah dikumpulkan.

G. Teknik Pengabsahan Data

Pengabsahan data adalah untuk menjamin bahwa semua yang telah diamati dan diteliti penulis sesuai dengan data yang sesungguhnya ada dan memang benar-benar terjadi. Hal ini dilakukan penulis untuk memelihara dan menjamin bahwa data tersebut benar, baik bagi pembaca maupun subjek penelitian. Guna memperoleh tingkat keabsahan data penulis menggunakan triangulasi, yaitu mengadakan perbandingan antara sumber data yang satu dengan yang lain.

Pengabsahan data adalah untuk menjamin bahwa semua yang telah diamati dan diteliti penulis sesuai dengan data yang sesungguhnya ada dan memang benar-benar terjadi. Hal ini dilakukan penulis untuk memelihara dan menjamin bahwa data tersebut benar, baik bagi pembaca maupun subjek

penelitian. Guna memperoleh tingkat keabsahan data penulis menggunakan triangulasi, yaitu mengadakan perbandingan antara sumber data yang satu dengan yang lain. Sebagaimana yang dikemukakan Moleong, yang di kutip dari (Kadirin, 2017) bahwa “Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai perbandingan terhadap data tersebut”. Tujuh Teknik triangulasi yang digunakan dalam penelitian ialah triangulasi sumber dan triangulasi teknik atau metode. Triangulasi dengan sumber, berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif. Hal demikian dapat dicapai dengan jalan:

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara.
2. Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakannya secara pribadi.
3. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu.
4. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang-orang berpendidikan menengah atau tinggi, orang beresda, orang pemerintahan.
5. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.

Sedangkan triangulasi teknik atau metode, menggunakan berbagai metode pengumpulan data untuk menggali data sejenis. Pada triangulasi ini, terdapat

dua strategi yaitu:

1. Pengecekan derajat kepercayaan penemuan hasil penelitian beberapa tehnik pengumpulan data.
2. Pengecekan derajat kepercayaan beberapa sumber data dengan metode yang sama.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Lokasi Penelitian

1. Gambaran Umum Kota Makassar

Kota Makassar merupakan salah satu pemerintahan kota dalam wilayah Provinsi Sulawesi Selatan yang terbentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi, sebagaimana yang tercantum dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822. Kota Makassar yang pada tanggal 31 Agustus 1971 berubah nama menjadi Ujung Pandang, wilayahnya dimekarkan dari 21 km² menjadi 175,77 km² dengan mengadopsi sebagian wilayah kabupaten lain yaitu Gowa, Maros, dan Pangkajene Kepulauan, hal ini berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971 tentang Perubahan batas-batas daerah Kota madya Ujung Pandang dengan Kabupaten Gowa, Kabupaten Maros dan Pangkajene dan Kepulauan, lingkup Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

Pada perkembangannya, nama Ujung Pandang dikembalikan lagi menjadi Kota Makassar sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang Perubahan Nama Kota madya Ujung Pandang menjadi Kota Makassar. Pada tahun 2020 Kota Makassar telah berusia 413 tahun sesuai Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2000 yang menetapkan hari jadi Kota Makassar tanggal 9 November 1607, terus berbenah diri menjadi sebuah Kota Dunia yang berperan tidak hanya sebagai pusat perdagangan dan jasa tetapi juga sebagai pusat

kegiatan industri, pusat kegiatan pemerintahan, pusat kegiatan *edu-entertainment*, pusat pelayanan pendidikan dan kesehatan, simpul jasa angkutan barang dan penumpang baik darat, laut maupun udara.

Luas Wilayah Kota Makassar tercatat 175,77 km persegi, dengan batas-batas wilayah administratif sebagai berikut: Sebelah Utara: Kabupaten Maros Sebelah Selatan: Kabupaten Gowa dan Kabupaten Takalar Sebelah Timur: Kabupaten Gowa dan Kabupaten Maros Sebelah Barat: Selat Makassar Secara administratif Kota Makassar terbagi atas 15 Kecamatan dan 153 Kelurahan. Bagian utara kota terdiri atas Kecamatan Biringkanaya, Kecamatan Tamalanrea, Kecamatan Tallo, Kecamatan Ujung Tanah dan Kecamatan Kepulauan Sangkarrang. Di bagian selatan terdiri atas Kecamatan Tamalate dan Kecamatan Rappocini. Di bagian Timur terbagi atas Kecamatan Manggala dan Kecamatan Panakkukang. Bagian barat adalah Kecamatan Wajo, Kecamatan Bontoala, Kecamatan Ujung Pandang, Kecamatan Makassar, Kecamatan Mamajang, dan Kecamatan Mariso. Rincian luas masing-masing kecamatan, diperbandingkan dengan persentase luas wilayah Kota Makassar sebagai berikut:

Tabel. 4.1: Rincian Luas Wilayah Kecamatan di Kota Makassar

Kode Wil	Kecamatan	Luas Area (km ²)	Persentase Terhadap Luas Kota Makassar
010	Mariso	1,82	1,04
020	Mamajang	2,25	1,28
030	Tamalate	20,21	11,50
031	Rappocini	9,23	5,25
040	Makassar	2,52	1,43
050	Ujung Pandang	2,63	1,50
060	Wajo	1,99	1,13
070	Bontoala	2,10	1,19
080	Ujung Tanah	5,94	2,51
090	Tallo	5,83	3,32
100	Panakukang	17,05	9,70
101	Manggala	24,14	13,73
110	Biringkanaya	48,22	27,43
111	Tamalanrea	31,84	18,12
112	Kepulauan Sangkarrang	15,40	0,87
7371	Kota Makassar	17.577	100,00

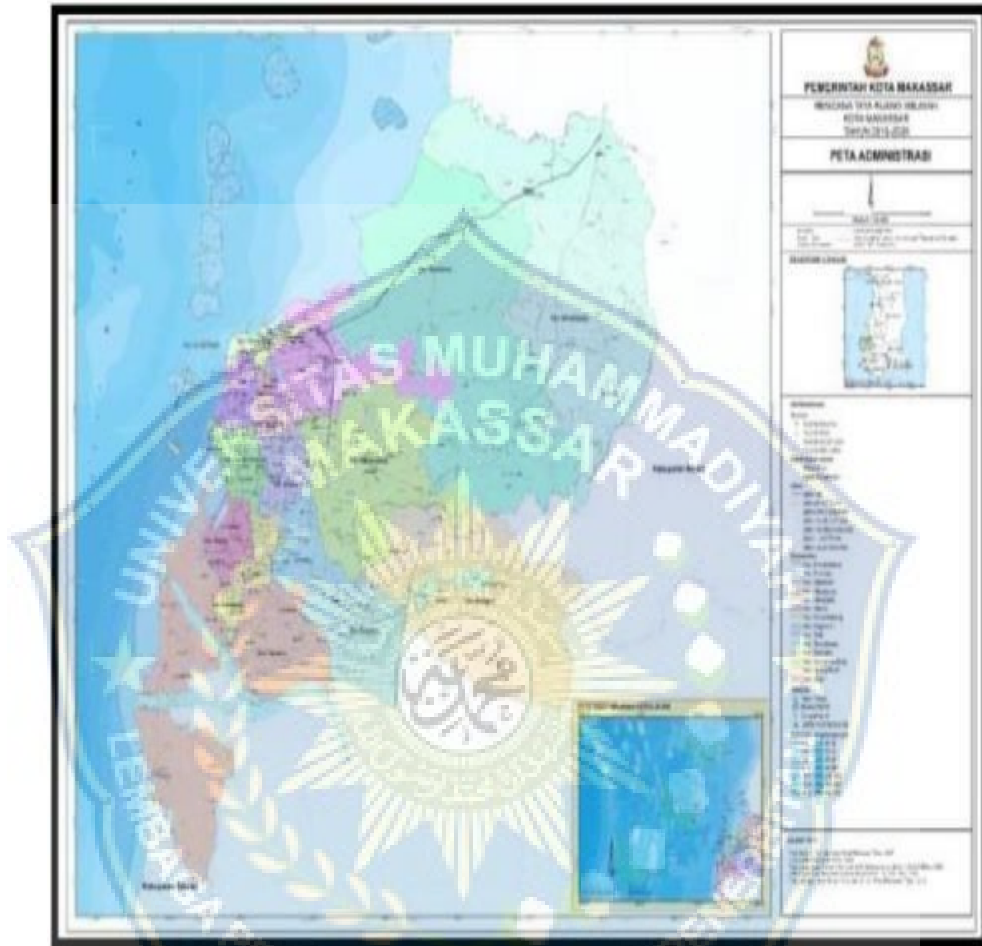
Sumber : Perda Nomor 4 Tahun 2015 Tentang RTRW Kota Makassar 2015-2034

Secara administratif Kota Makassar berdasarkan Peraturan Daerah

Nomor 4 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Makassar 2015 - 2034 pada pasal 5 terdiri atas 15 Kecamatan dan 153 Kelurahan dapat

dilihat pada gambar berikut ini :

Gambar 3 : Peta Wilayah Administrasi Kota Makassar



Sumber : Perda Nomor 4 Tahun 2015 Tentang RTRW Kota Makassar 2015-2034

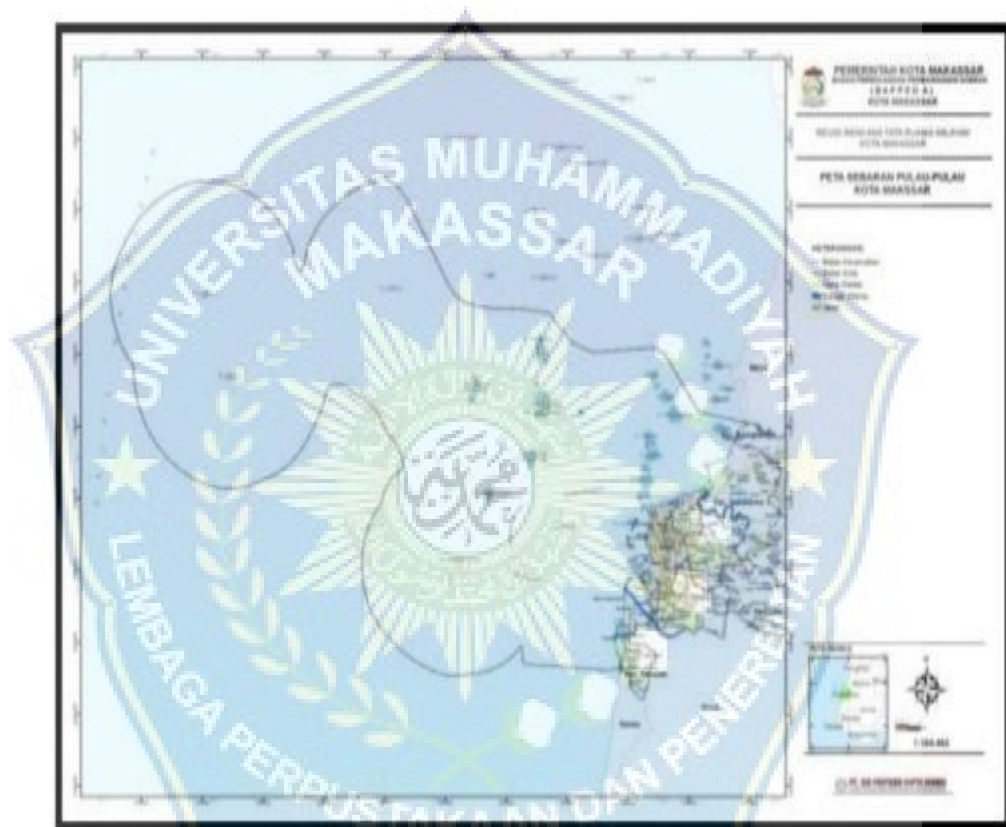
Selain memiliki wilayah daratan, Kota Makassar juga memiliki wilayah kepulauan yang dapat dilihat sepanjang garis pantai Kota Makassar. Pulau ini merupakan gugusan pulau-pulau karang sebanyak 12 pulau, bagian dari gugusan pulau-pulau sangkarrang, atau disebut juga pulau-pulau pabbiring, atau lebih dikenal dengan nama Kepulauan

Spermonde. Pulau-pulau tersebut adalah Pulau Lanjukang (terjauh), Pulau Langkai, Pulau LumuLumu, Pulau Bonetambung, Pulau Kodingareng Lompo,

Pulau Barrang Lompo, Pulau Barrang Caddi, Pulau Kodingareng

Keke, Pulau Samalona, Pulau Lae-Lae, Pulau Lae-Lae Kecil (Gusung) dan Pulau Kayangan. Wilayah Kepulauan Kota Makassar dapat dilihat pada gambar berikut ini :

Gambar 4: Peta Sebaran Pulau-Pulau di Kota Makassar



Sumber : Perda Nomor 4 Tahun 2015 Tentang RTRW Kota Makassar 2015-2034

Kota Makassar adalah merupakan Ibukota Provinsi Sulawesi Selatan terletak di Pantai Barat pulau Sulawesi berada dalam titik koordinat $119^{\circ} 18' 30,18''$ sampai dengan $119^{\circ} 32' 31,03''$ BT dan $5^{\circ} 00' 30,18''$ sampai dengan $5^{\circ} 14' 6,49''$ LS. Sesuai dengan karakteristik fisik dan perkembangannya, berikut ini deskripsi wilayah kecamatan mariso Kecamatan Mariso merupakan kecamatan

yang memiliki luas wilayah yang paling kecil yakni hanya 1,04% dari luas wilayah Kota Makassar atau sekitar 1,82 km² dengan jumlah penduduk sebesar 60.866 jiwa. Penggunaan lahan di kecamatan ini sebagian besar diperuntukkan pada pemukiman, pertokoan, dan perkantoran. Untuk potensi bencana alam di kecamatan ini berupa abrasi pantai. Oleh karena itu pantai di Kecamatan Mariso pada umumnya sudah mengalami pengerasan dengan tembok pematang pantai, karena sebagian besar pantai di Kecamatan ini merupakan daerah pangkalan pendaratan ikan (TPI Rajawali) dan permukiman pantai.

Kota Makassar kini berkembang tidak lagi sekedar gateway namun diposisikan sebagai ruang keluarga (living room) di Kawasan Timur Indonesia. Sebagai kota metropolitan, Makassar tumbuh dengan ditunjang berbagai potensi, yang salah satunya adalah jumlah penduduk.

Berdasarkan data tabel 4.2 jumlah penduduk terbesar yang dirinci menurut Kecamatan terdapat di Kecamatan Biringkanaya sejumlah 226,621 jiwa sedangkan jumlah penduduk terkecil terdapat di Kecamatan Sangkarrang sejumlah 14.602 jiwa. Tingkat kepadatan penduduk terbesar pada Kecamatan Makassar yaitu 34.011,50, sedangkan kepadatan penduduk yang terkecil di Kecamatan Tamalanrea yaitu 3.675,00. Hal ini memberi gambaran bahwa distribusi penduduk yang terjadi di Kota Makassar tidak merata, dimana luas wilayah tidak berbanding lurus dengan jumlah penduduk, dalam arti bahwa luas wilayah yang besar tidak mempunyai jumlah penduduk yang besar demikian pula sebaliknya luas wilayah yang kecil yang tidak memiliki jumlah penduduk yang kecil.

Tabel 3 : Distribusi dan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan

Kode Wilayah	Kecamatan	Luas Wilayah (km ²)	%	Penduduk	%	Kepadatan Penduduk/ Jiwa/Km ²
10	Mariso	1,82	1,04	60.866	3,94	33.442,84
20	Mamajang	2,25	1,28	61.557	3,98	27.358,67
30	Tamalate	20,21	11,50	209.214	13,54	10.352,00
31	Rappocini	9,23	5,25	171.893	11,12	18.623,29
40	Makassar	2,52	1,43	85.709	5,65	34.011,50
50	Ujung Pandang	2,63	1,50	29.291	1,89	11.109,89
60	Wajo	1,99	1,13	31.606	2,05	15.882,41
70	Bontoala	2,10	1,19	57.379	3,71	27.323,33
80	Ujung Tanah	4,40	2,50	35.534	2,31	8.116,14
90	Tallo	5,83	3,32	140.621	9,10	24.120,24
100	Panakkukang	17,05	9,70	150.189	9,72	8.808,74
101	Manggala	24,14	13,73	153.174	9,91	6.345,24
110	Biringkanaya	48,22	27,43	226.621	14,66	4.699,77
111	Tamalanrea	31,84	18,11	117.012	7,57	3.675,00
112	Sangkarrang	1,54	0,88	14.602	0,94	9.481,82
7371	Kota Makassar	157,77	100	1.543.373	100	8.693,10

Sumber: BPS Kota Makassar 2020

B. Kota Cerdas (*Smart City*) Kota Makassar

Misi Sombere' dan *Smart City*" dengan Imunitas Kota Yang Kuat untuk Semua Perwujudan dari nilai-nilai luhur budaya etnis "Bugis Makassar" yang ramah tamah dan santun serta bersahabat dan didukung pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam pelayanan dan pemberdayaan masyarakatserta pembangunan. Sombere' berkaitan dengan *Heartware* atau "Perangkat Hati", sedangkan *Smart City* berkaitan dengan *Hardware* dan *Software* atau "Perangkat Keras" dan "Perangkat Lunak". Diharapkan dengan Sombere' dan *Smart City* menjadikan Makassar kota cerdas yang berbasis teknologi serta berkarakter budaya lokal.

1. Komponen *Smart City* Kota Makassar

a. *Smart Economy*

Membangun ekosistem creative berbasis ICT yang berdaya saing (creative industri), (welfare), ekosistem transaksi elektronik (*e-Transaction*).

b. *Smart Living*

Mengintegrasikan tata ruang inklusif, sistem pelayanan publik berkualitas tinggi, sistem transportasi cerdas Multi-moda integration (transportation)

c. *Smart Society*

Community angagement, Membangun, ekosistem literasi masyarakat yang tinggi, Mewujudkan sistem keamanan lingkungan masyarakat (resilient city)

d. *Smart Environment*

Proteksi Lingkungan (*Environment Protection*), Mengembangkan Tata Kelola Sampah dan Limbah (*Waste*), Melaksanakan Pemanfaatan energy yang lebih efisien (*Energy efisiensi*).

e. *Smart Branding*

Ekosistem Pariwisata (*Tourism Branding*), Menguatkan core Bisnis atau produk unggulan Daerah (*Business Branding*), Membangun arsitektur Wajah Kota berciri kearifan lokal (*City Appearance Branding*).

f. *Smart Governance*

Pemerintahan terintegrasi, kolaborasi, dan Birokrasi yang efisien (*efficient e-governance*).

2. Ciri Makassar *Sombere* dan *Smart City*

Kota Makassar sebagai Kota yang berstandar dunia, diawali dari kebutuhan Masyarakat, dilahirkan dari Inovasi SKPD, dilaksanakan secara kolaborasi dan dengan Sistem Pemerintahan terintegrasi dengan Tagline *SOMBERE* dan *SMARTCITY*.

3. Perjalanan Inisiatif *Smart City* Kota Makassar

a. 2015-2016 Komitmen Kuat

Pembangunan Operation Room, Master Plan BTS, Open data Platform Platform, Perencanaan dan Pembangunan CARESTER (*Cere Rescue and Centre*), Integrasi CCTV dengan Polrestabes, terbangunnya 117 Innovation SKPD.

b. 2017-2018 Kolaborasi

Layanan NTPD 112, Pengadaan aplikasi Kinerja, Pembangunan Data elektronik Kepegawaian, Implementasi aplikasi kinerja dan absensi, dsb.

c. 2018-2020 Integrasi

Penguatan Kebijakan dan *Smart City*, Perencanaan *Integrated e-Tax Integrated e-planning /E-Budgeting* Pembangunan aplikasi Open data Pelaksanaan *One stop service*, *MOU E-Governance*, pemasangan *CCTV Traffic Analytic*, Pengembangan Kapasitas Data *centre Higher Cover Infrastructure (HCI)*, NAS dan sebagainya

d. 2021-2022 Interopera

★ Kebijakan satu data satu peta, Penguatan Infratraktur jaringan, Penguatan SDM digital Evaluasi dan Standarisasi, Dukungan ETL, Metaverse, perencanaan Marvec Perda Omnibus Sombere dan SmartCity, Perwali Pelaksanan SPBE Kota Makassar.

e. 2023-2024 Makaverse

Penyusunan Arsitektur SPBE Inkubator Center, Makassar metaverse untuk mendukung layanan secara virtual pemerintah kota Makassar, layanan virtual dan rapat virtual dan sosial interaksi multidimensi.

C. Hasil Penelitian

Kota cerdas (*smart city*) merupakan program Pemerintah Kota Makassar yang dirancang pada tahun 2021 dibuktikan dengan keluarnya rancangan peraturan Daerah Kota Makassar pada tahun 2021 tentang *SOMBERE* dan *SMART CITY*. Kemudian dilanjutkan dengan terbitnya peraturan Wali Kota Makassar nomor 84 tahun 2022 tentang penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik di lingkungan pemerintah daerah dan peraturan Wali kota Makassar nomor 92 tahun 2022 tentang satu data Indonesia tingkat daerah.

Pembentukan Tim pelaksana Makassar dan Sombere *city* diatur dalam keputusan Wali kota Makassar nomor 1993/049.05/Tahun2023 yang ditetapkan di Makassar pada tanggal 4 April 2023 oleh Walikota Makassar Moh. Ramdhan Pamanto. Kemudian program ini tetap berlanjut dibuktikan dengan keluarnya keputusan wali kota Makassar Nomor: 1121/188.4.45/Tahun 2024 tentang pembentukan dewan Makassar Sombere dan *Smart city* periode tahun 2024-2026.

Berdasarkan uraian dan data diatas dapat diuraikan bahwa diplomasi pemerintah melalui jejaring kota cerdas untuk pembangunan berkelanjutan di Kota Makassar memang diatur dalam peraturan wali kota dan terdapat struktur yang bertanggungjawab mengenai prograd di Kota Makassar, maka dari itu saya sebagai melakukan wawancara kepada beberapa pihak yang bertanggungjawab dalam menjalankan program ini.

1. Pemerintahan Terintegrasi

Integrasi diartikan mutu, sifat, atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan dan kejujuran.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Yamlikh Azikin selaku pegawai bagian analisis sistem informasi bappeda makassar menyatakan sebagai berikut:

“Mengenai jangka panjang kota cerdas sebenarnya sudah digaulkan sejak tahun 2009. Dulunya bukan kota cerdas namanya tapi e-government (pemerintahan elektronik) itu berevolusi menjadi smart city. Kalau dalam jangka panjang memang kita selalu berevolusi setahap demi setahap, yang dimulai dari e-government. Nah e-government kan bagaimana pekerjaan-pekerjaan kota ini yang sebelumnya kita lakukan secara manual bisa di elektronikkan dalam segi pelayanan. Kalo berevolusi lagi ke smart city itu bukan Cuma bagaimana menjalankan pemerintahan secara elektronik, tidak. Itu bagaimana semua stakeholder yang di dalam perkotaan ini bisa bersinergi dan juga bisa menggunakan teknologi informasi dalam memudahkan pelayanan dan juga membangun kota ini” (Hasil wawancara pada tanggal 11 Juni 2024)

Berdasarkan hasil wawancara diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa semua stakeholder Pemerintahan yang di dalam perkotaan ini bisa bersinergi dan juga bisa menggunakan teknologi informasi dalam memudahkan pelayanan dan juga membangun kota Makassar.

Tabel 4 : Program integritasi Pemerintah Kota Makassar

Integritasi	ASCN Laos, Pemkot Makassar Sajikan Program Smart City Unggulan. Memaparkan strategi dan progres program Homecare Dottorotta dan Telemedicine, Pakinta E-Tax Payment, Lorong Wisata, Inkubator Center serta Makassar <i>Virtual Economy Center</i> (Marvec).
	ASCN, Pemkot Makassar Paparkan Progres Implementasi <i>Smart City</i> . Adapun rangkaian kegiatan

	<p>rapat koordinasi yang diikuti Kota Makassar sebagai anggota ASCN yakni memaparkan <i>Progress and Challenges in Implementing the Smart City Projects</i> di Makassar, yang dilanjutkan dengan diskusi. ASCN dibentuk pada KTT ASEAN ke-32 (2018) di Singapore sebagai platform kolaboratif kota-kota dari negara-negara anggota ASEAN untuk bekerja sama menuju pembangunan dan pengembangan kota cerdas dan berkelanjutan.</p>
	<p>Study Tiru Penerapan SPBE, Plt Diskominfo Makassar Sambut Kunjungan Diskominfo Pinrang. Kabid Pengembangan E-Government Diskominfo Kabupaten Pinrang, Andi Setya mwlakukan kunjungan dalam rangka koordinasi terkait Penerapan SPBE di Kota Makassar. Sehubungan dengan kemajuan yang telah dicapai oleh Diskominfo Makassar dalam penerapan SPBE.</p>

2. Kolaborasi

Kolaborasi adalah sebuah kata yang mengandung arti perbuatan atau kerjasama dengan siapa saja. Dalam program *smart city* tentu saja tidak dapat dijalankan atau berjalan dengan baik tanpa adanya kolaborasi dari berbagai pihak. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Yamlikh Azikin selaku pegawai bagian bagian analisis sistem informasi bappeda makassar menyatakan sebagai berikut:

“Kalau *smart city* itu semua, smart city itu bukan cuman pemerintahnya saja ada namanya smart governance (pemerintahan cerdas), *smart environment* (lingkungan cerdas), smart branding bagaimana kota-kota itu membranding dirinya secara tepat dan cepat dalam memperkenalkan daerahnya keluar, ada lagi *smart living* (kehidupan cerdas), *smart society* (masyarakat cerdas) semua. Jadi *smart city* itu bukan hanya pemerintahnya saja itu sudah mencakup ke seluruh kota dimana semua masyarakat pemerintah, akademisi juga masyarakat berperan penuh dalam menjalankan program-program supaya kota ini menjadi kota yang cerdas. Jadi bukan hanya pemerintahnya tapi semuanya bersinergi khususnya antara pemerintah dengan pihak swasta dan akademisi itu sekarang pemerintah kota

sedang meningkatkan kerjasamanya. Kalau peran serta masyarakat sebenarnya masyarakat cuma mengamati kinerja dari pemerintah sekarang karena selain mengamati juga menilai sebagai contoh karena sekarang masyarakat menggunakan media sosial untuk berinteraksi di dunia maya. Jadi bagaimana kita pemerintah juga bisa menyuarakan, mensosialisasikan layanan-layanan apa saja yang kami lakukan di media sosial maka ketika kami menyampaikan hal tersebut di media sosial masyarakat bisa berinteraksi langsung itu juga bagian dari prinsip kota cerdas dimana ada beberapa *smart city* (kota cerdas), ada *smart government*, *smart living*, *smart society*, dan *smart environment*. Mungkin yang saya contohkan tadi itu masuk di *smart government* yang bisa menggunakan media sosial dalam menginfokan layanan-layanan apa yang berjalan dimasa sekarang..” (Hasil wawancara pada tanggal 11 Juni 2024)

Berdasarkan hasil wawancara diatas saya dapat menyimpulkan bahwa kolaborasi yang dilakukan pemerintah yakni melibatkan dan bekerjasama dengan masyarakat, akademisi dan swasta.

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara dari Andi Zulfitra Dianta, S.IP., M.A. (Kepala Bagian Kerjasama pada Sekretariat Daerah Kota Makassar) mengenai kolaborasi *smart city* adalah sebagai berikut :

“Kalau terkait dengan kerjasama tentu kami dapat deposisi melakukan fasilitasi kerjasama daerah yang mendukung pencapaian makassar sebagai kota dunia atau makassar sebagai kota cerdas. Kembali tadi saya sampaikan sebenarnya kita harus melihat visi kota makassar itu yang tertuang dalam RPJMD memang salah satunya adalah bagaimana menjadikan makassar kota yang nyaman. Tetapi mencapai makassar kota yang nyaman caranya bagaimana? Salah satunya adalah pendekatan menggunakan kemajuan teknologi, kemajuan IT sehingga mungkin yang kalo kita sebutnya sebagai kota pintar (*smart city*). Banyak yang kami lakukan fasilitasi penyusunan kerjasama daerah itu cukup banyak. Tema *smart city*, tema IT itu menjadi topik kerjasama daerah yang sangat aktif di beberapa tahun belakangan ini. Sebagai contohnya terakhir misalnya ada penandatanganan yang kemajuan antara pemerintah kota dengan PERURI (perusahaan percetakan uang republik Indonesia) ternyata mereka di amanahkan oleh undang-undang sebagai salah satu lembaga pemerintah yang bergerak pada penerapan teknologi kota pintar. Itu kemudian pemerintah kota melalui diskominfo melakukan kerjasama dengan PERURI. Kemudian banyak pihak yang lain juga dengan

pemerintah daerah lain, pemerintah daerah di negara asing kita dapat bantuan dalam proyek pembangunan kawasan kumuh melalui rise dengan monas university australia. Sehingga cukup banyak kerjasama yang pemerintah kota lakukan dalam bidang *smart city*.” (Hasil wawancara pada tanggal 12 Juni 2024)

Berdasarkan hasil wawancara diatas penulis menyimpulkan bahwa kolaborasi yang dilakukan oleh Pemerintah bukan hanya di dalam negeri tapi juga melakukan kerjasama dengan dengan negara lain seperti Australia.

Tebel 5 : Program Kolaborasi Pemerintah Kota Makassar

Kolaborasi	Kolaborasi Sekolah Ramah Anak, Program Selaras ini bertujuan guna mengutamakan kesejahteraan dan kebutuhan anak secara holistik di sektor pendidikan melalui fitur pengaduan yang disediakan.
	Kota Makassar dan Kota Yokohama Bahas Rencana Kolaborasi Program <i>City to City</i> , program dukungan pembentukan Kota Zero Carbon tentu diawali dengan memahami potensi dan berbagi pengetahuan antar kedua pihak terkait dekarbonisasi.
	Dinas Kominfo Makassar Dorong Pembentukan Kelompok Informasi Masyarakat Promosikan Lorong Wisata. KIM merupakan kelompok yang dibentuk oleh, dari, untuk masyarakat secara mandiri dan kreatif yang aktivitasnya melakukan pengelolaan informasi tentang kegiatan dan keunggulan di Lorong Wisata masing-masing.
	Pemkot Makassar Dorong Pelaku UMKM Go Digital. PT Tiki Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) bersama Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar menggelar talkshow bertajuk “UMKM Go Digital”

3. Birokrasi Yang Efisien

Pemerintah dan seluruh aparatur yang dikenal dengan birokrasi memiliki peranan yang cenderung dominan dalam menentukan kebijakan, sehingga birokrasi memiliki peran dalam menentukan proses administrasi dalam mewujudkan tujuan pembangunan.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Yamlikh Azikin selaku pegawai bagian bagian analisis sistem informasi bappeda makassar menyatakan sebagai berikut:

“Yang pertama itu kita susun yang di BAPPEDA (badan perencanaan daerah) merencanakan itu mulai dari sekarang kita merencanakan 25 tahun kedepan apa yang akan dihadapi dan di rencanakan oleh kota makassar itu 25 tahun kedepan nanti kita lagi nyusun proyek rancangan bangunan jangka panjang. Jadi ada juga 5 tahun, ada juga tahunan. Jadi semua perencanaan memang harus berdasarkan dokumen yang kita susun yaitu RPJPD (rancangan pembangunan jangka panjang daerah) jadi dari RPJMN (rancangan pembangunan jangka menengah nasional) dari negara turun ke daerah. Semuanya saling berkaitan, ujung-ujungnya itu rancangan pembangunan jangka panjang negara semuanya diambil dari situ dan diturunkan ke daerah. Jadi kalau prinsip kota cerdas itu mengintegrasikan informasi dan komunikasi dalam tata kelola sehari-hari dengan tujuan mempertinggi efisiensi. Sebenarnya bukan Cuma bappeda yang melakukan prinsip tersebut tapi seluruh SKPD diharapkan melakukan atau mengintegrasikan seluruh kegiatannya menggunakan perangkat teknologi informasi dan komunikasi dalam mengupgrade layanan nya pada masyarakat.” (Hasil wawancara pada tanggal 11 Juni 2024)

Berdasarkan hasil wawancara di atas saya dapat menyimpulkan bahwa pemerintah merencanakan 25 tahun kedepan apa yang akan dihadapi dan di rencanakan oleh kota makassar itu 25 tahun kedepan nanti kita lagi nyusun proyek rancangan bangunan jangka panjang.

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara dari Andi Zulfitra Dianta , S.IP., M.A. (Kepala Bagian Kerjasama pada Sekretariat Daerah Kota Makassar) mengenai birokrasi *smart city* adalah sebagai berikut :

“Pertanyaan ini sekiranya spesifik sehingga secara konkret nanti itu teman-teman di dinas kominfo yang lebih bisa memberikan informasi tetapi paling tidak kami pahami memang ada 2 hal utama yang pertama: penyiapan sumber daya manusianya, menjadi kota pintar tetapi manusianya tidak mempunyai tentu tidak akan bisa. Yang kedua: penyiapan infrastrukturnya. Infrastruktur ini banyak macam, ada yang

IT, sehingga teman-teman di dinas kominfo itu melakukan pengadaan perangkat IT, penyempurnaan *War Room* yang kita punya di balaikota. Sekarang pemerintah kota Makassar itu sedang membangun pusat pelayanan publik yang terintegrasi namanya dikenal dengan Makassar *governance center* yang posisi lokasinya ada di taman macan. Nah itu nanti tempat central pelayanan publik bagi warga kota makassar, termasuk adalah pelayanan perizinan maupun pelayanan yang terkait dengan IT karena pusat kendalu dari IT nya nanti pemerintah kota nanti adanya di MGC (makassar governance center).” (Hasil wawancara pada tanggal 12 Juni 2024)

Berdasarkan hasil wawancara di atas saya dapat memahami bahwa pemerintah kota Makassar memang belum sepenuhnya siap dengan program *smart city* ini, terlebih masih banyak kekurangan dalam menyambut program ini, sehingga birokrat kita kurang efektif dalam menjalankan program ini.

Tabel 6 : Program Birokrasi Pemerintah Kota Makassar

Birokrasi	Koordinasi Bersama Inspektorat, Diskominfo Makassar Bahas Persiapan Audit SPBE, Diskominfo mengajak Inspektorat sebagai lembaga internal yang secara formal menyediakan kelengkapan administrasi pelaksanaan audit SPBE, dan secara teknis akan berkerjasama dalam proses audit.
	Penerapan Sikda Generik, Plt Kadis Kominfo Paparkan Pentingnya Integrasi Data
	Perkuat Strategi Implementasi Kota Cerdas, Diskominfo Makassar Gelar Rakor. Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Makassar gelar rapat koordinasi <i>Sombere'</i> dan <i>Smart City</i> guna memperkuat strategi ke depan terkait implementasi kota cerdas.

Adapun beberapa pegawai dari BAPPEDA yang sebelumnya saya mewawancarai informan tersebut yang pertama ada ibu Ifanna Mursalin pernyataannya bahwa terkait dengan judul saya ini bukan dari bagiannya dan saya diarahkan lagi ke bapak Ikhsan IPW BAPPEDA kemudian saya juga diberikan pernyataan yang sama. Lalu bapak

Ikhsan mengarahkan saya ke ibu Ririn Widayat IPW terkait diplomasi kota kemudian ibu Ririn Widayat akhirnya mengarahkan saya tepat langsung pada informan yang saya wawancarai yaitu bapak Yamlikh Azikin.

Kemudian dari bagian kerjasama yang pertama saya temui itu ada ibu Linda lalu saya disuruh menunggu untuk konfirmasi langsung ke kepala bagian kerjasama pemerintah kota makassar yaitu bapak Andi Zulfitra Dianta. Selang beberapa hari respon dan konfirmasi bagian kerjasama menyuruh saya langsung menemui beliau untuk melakukan wawancara.

D. Pembahasan Penelitian

1. Pemerintahan Terintegrasi

Pemerintah Kota Makassar berkeinginan melakukan pemangkasan regulasi yang dianggap menghambat investasi yang didukung oleh regulasi yang telah ditetapkan oleh Pemerintah sebagai payung hukum. Hal ini dilaksanakan dengan pola memunculkan peraturan baru yang dirumuskan dalam rangka percepatan investasi sebagaimana yang dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha (Perpres 91/2017). Dalam Perpres 91/2017, Pemerintah mengupayakan simplifikasi dalam hal perizinan berusaha melalui: (1) Bentuk pelayanan, pengawalan (*end to end*), dan peran aktif penyelesaian hambatan pelaksanaan berusaha melalui pembentukan satuan tugas pada tingkat nasional, kementerian/lembaga,

daerah provinsi, dan daerah kabupaten/kota, dalam rangka mendukung percepatan pembentukan iklim investasi yang baik; (2) Bentuk pemenuhan persyaratan (*checklist*), dalam rangka percepatan pelaksanaan berusaha di kawasan ekonomi khusus, kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas, kawasan industri, dan/atau kawasan pariwisata; (3) Reformasi peraturan yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan usaha, yang mana penyederhanaan lebih lanjut perlu diatur dan ditetapkan kembali standar pelayanan pada kementerian/lembaga, daerah provinsi, dan daerah kabupaten/kota, dengan tujuan agar selaras dan tidak tumpang tindih; (4) Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (PBTSE) atau *Online Single Submission* (OSS).

2. Kolaborasi

Kota Makassar sebagai Kota yang berstandar dunia, diawali dari kebutuhan Masyarakat, dilahirkan dari Inovasi SKPD, dilaksanakan secara kolaborasi dan dengan Sistem Pemerintahan terintegrasi dengan Tagline *SOMBERE* dan *SMART CITY*.

Untuk mendukung terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berdayaguna dan berhasilguna untuk memacu kemajuan Pemerintah Kota Makassar dalam mewujudkan Makassar sebagai Kota Dunia dan sejalan dengan tujuan penyelenggaraan otonomi daerah, perlu melakukan berbagai upaya untuk memenuhi hak warga

masyarakat atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan melalui penataan berbagai regulasi daerah.

Upaya penataan dengan perubahan pengaturan yang berkaitan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, peningkatan ekosistem investasi, percepatan proyek strategis nasional, dan peningkatan perlindungan dan kesejahteraan masyarakat dilakukan melalui perubahan peraturan daerah yang belum mendukung terwujudnya sinkronisasi dalam menjamin percepatan peningkatan ekonomi daerah, sehingga diperlukan terobosan hukum yang dapat menyelesaikan berbagai permasalahan dalam beberapa peraturan daerah ke dalam satu peraturan daerah secara komprehensi.

Makassar masuk dalam daftar berkat sejumlah capaian yang baik seperti akses informasi pemerintahan, ketersediaan layanan medis, transportasi publik, hingga ketersediaan lapangan kerja baru. Namun Makassar memiliki beberapa catatan yang perlu menjadi perhatian. Antara lain terkait kemacetan. Untuk mengatasi kemacetan lalu lintas di Kota Makassar perlu inovasi berbasis teknologi. Mengingat *Smart City* atau kota cerdas merupakan wilayah kota yang telah mengintegrasikan teknologi informasi dan komunikasi dalam tata kelola sehari-hari dengan tujuan untuk mempertinggi efisiensi, memperbaiki pelayanan publik, dan meningkatkan kesejahteraan warga.

Smart City tidak hanya berkenaan dengan pemerintah, tetapi juga bagaimana membangun ekosistem yang terdiri dari berbagai pihak,

yang di dalamnya ada partisipasi dan interaksi. Keterlibatan generasi muda dapat menciptakan beragam inovasi dalam mewujudkan *Smart City* di Kota Makassar. Membuka ruang bagi generasi muda untuk ikut memikirkan wajah *Smart City* Kota Makassar kedepannya, karena anak muda memiliki segudang inovasi dan pemikiran baru. Karena bisa saja yang belum dipikirkan pemerintah dipikirkan oleh anak-anak muda. Selain mengasah kreatifitas, pemuda memiliki kesempatan menjadi agen perubahan yang aktif dalam menciptakan inovasi dan solusi baru dalam dunia digitalisasi yang terus berkembang, khususnya *Smart City*.

3. Birokrasi Yang Efisien

Dalam rangka mendukung terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berdaya guna, berhasil guna, dan memacu kemajuan Pemerintah Kota Makassar dan sejalan dengan tujuan penyelenggaraan otonomi daerah, maka diperlukan sumber pembiayaan yang tersedia secara pasti yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Berdasarkan Visi dan Misi Walikota Makassar yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Makassar Tahun 2021-2026, Kota Makassar berkehendak untuk menjadi 5 (lima) besar kekuatan ekonomi nasional dengan menjadi daerah berpendapatan tinggi pada tahun 2040. Oleh karena itu, dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026, Pemerintah Kota Makassar telah menargetkan pertumbuhan ekonomi yang tumbuh rata-rata 3 (tiga) persen dalam 5 (lima) tahun dan pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita sebesar 2 (dua) persen.

Dalam jangka panjang, transformasi ekonomi yang dilakukan pada tahun 2022-2040 akan membuat Kota Makassar keluar dari *Middle Income Trap* (MIT) di tahun 2036. Indonesia sendiri masih menjadi negara *Upper Middle Income* (IMI) pada tahun 2019 dengan *Gross National Income* (GNI) per kapita US\$ 6.010. Dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi sebesar 5,7 (lima koma tujuh) persen dan pertumbuhan PDB ril per Kapita sebesar 5 (lima) persen, pada tahun 2040, Kota Makassar diprediksi menjadi daerah maju dengan ekonomi berkelanjutan, tingkat kemiskinan mendekati 0 (nol) persen, dan memiliki tenaga kerja yang berkualitas.

Namun pada kondisi saat ini, Kota Makassar menghadapi tantangantantangan yang besar, baik yang bersumber dari eksternal maupun internal. Tantangan eksternal, dipicu dari kondisi perekonomian global (dunia) dan nasional yang kini tengah mengalami pelemahan dan ketidakpastian. Dinamika geopolitik dan hadirnya berbagai teknologi baru pada era Revolusi Industri Keempat yang mengubah lanskap ekonomi global dan nasional merupakan sumber ketidakpastian yang membatasi pergerakan perekonomian nasional dan daerah. Pertumbuhan ekonomi nasional yang melambat telah memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap perekonomian daerah. Dalam rangka menjaga momentum pertumbuhan ekonomi, Pemerintah Kota Makassar terus berupaya untuk mempertahankan daya beli masyarakat dengan mendorong peningkatan ekonomi daerah melalui peningkatan konsumsi Pemerintah Kota Makassar dan peningkatan kinerja investasi di daerah.

Jika diuraikan secara detail, permasalahan yang masih menjadi penyebab rendahnya peringkat kemudahan berusaha disebabkan oleh

beberapa indikator seperti rumitnya perizinan dalam memulai berusaha, sulitnya mendapatkan akses pembiayaan, dan rumitnya pengembangan usaha. Indikator-indikator tersebut tidak hanya memiliki peringkat yang rendah namun pada tahun 2020 mengalami penurunan peringkat, sehingga perlu dilakukan sebuah upaya serius agar iklim investasi dapat menjadi lebih baik.

Pemerintah Kota Makassar berkeinginan melakukan pemangkasan regulasi yang dianggap menghambat investasi yang didukung oleh regulasi yang telah ditetapkan oleh Pemerintah sebagai payung hukum. Hal ini dilaksanakan dengan pola memunculkan peraturan baru yang dirumuskan dalam rangka percepatan investasi sebagaimana yang dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha (Perpres 91/2017). Dalam Perpres 91/2017, Pemerintah mengupayakan simplifikasi dalam hal perizinan berusaha melalui: (1) Bentuk pelayanan, pengawalan (endtoend), dan peran aktif penyelesaian hambatan pelaksanaan berusaha melalui pembentukan satuan tugas pada tingkat nasional, kementerian/lembaga, daerah provinsi, dan daerah kabupaten/kota, dalam rangka mendukung percepatan pembentukan iklim investasi yang baik: (2) Bentuk pemenuhan persyaratan (*checklist*), dalam rangka percepatan pelaksanaan berusaha di kawasan ekonomi khusus, kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas, kawasan industri, dan/atau kawasan pariwisata: (3) Reformasi peraturan yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan usaha, yang mana penyederhanaan lebih lanjut perlu diatur dan ditetapkan kembali standar pelayanan pada kementerian/lembaga, daerah provinsi, dan daerah kabupaten/kota, dengan tujuan agar selaras dan tidak tumpang tindih: (4) Sistem

Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (PBTSE) atau *Online Single Submission*(OSS).

Mengawali langkah mewujudkan cita-cita 10 (sepuluh) tahun mendatang, maka salah satu upaya yang perlu dilakukan yaitu dengan pemangkasan regulasi dan penyiapan Omnibus Law Makassar Kota Dunia.

Dalam melakukan penataan regulasi, teknik legislasi baru yakni teknik Omnibus Law pun diterapkan. Dengan menggunakan teknik Omnibus Law, persoalan dalam berbagai regulasi daerah tersebut dapat diselesaikan tanpa harus merevisi atau mencabut berbagai peraturan daerah yang substansinya terkait dengan pengembangan ekonomi daerah, melainkan cukup dengan membuat 1 (satu) peraturan daerah baru yang mengamandemen pasal dalam beberapa peraturan daerah. Omnibus merupakan metode untuk membuat sebuah regulasi yang terdiri atas banyak subjek atau materi pokok untuk tujuan tertentu guna menyimpangi suatu norma peraturan. Omnibus berbeda dengan rancangan peraturan kebanyakan dalam hal jumlah materi muatan yang dicakup, banyaknya pasal yang diatur (ukuran), dan terakhir dari sisi kompleksitas. Dalam sebuah peraturan daerah Omnibus mencakup hampir semua substansi materi yang berhubungan. Peraturan daerah Omnibus mencerminkan sebuah integrasi dan kodifikasi peraturan yang tujuan akhirnya untuk mengefektifkan penerapan peraturan tersebut. Teknik legislasi omnibuslawdari segi teoretis maupun praktis masih belum terlalu dikenal di Indonesia. Omnibus Law sendiri merupakan suatu metode untuk menghasilkan regulasi yang berkualitas, bukan bentuk produk hukum.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian terkait diplomasi pemerintah melalui jejaring kota cerdas untuk pembangunan berkelanjutan di Kota Makassar, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pada tahun 2009 Pemerintah Kota Makassar sudah diperkenalkan dengan *e-government* (Pemerintahan elektronik) yang kemudian saat ini berevolusi menjadi kota cerdas. Pada tahun 2018 Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Kota Makassar No 4 Tahun 2018 tentang sistem pengelolaan data terpadu Daerah Kota Makassar, kemudian terus berlanjut dengan mengeluarkan peraturan dan surat keputusan yang mengatur tentang kota cerdas hingga saat ini.
2. Untuk mendukung program kota cerdas maka Pemerintahan harus terintegrasi, melakukan kolaborasi dengan berbagai pihak dan juga birokrasi yang efisien.
3. Program kota cerdas di kota Makassar belum sepenuhnya berjalan. Hal ini dibuktikan dengan beberapa penanggungjawab program ini masih belum mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan kota cerdas.

B. Saran

1. Perumusan kebijakan dan regulasi: bertanggung jawab dalam perumusan kebijakan, regulasi, dan panduan yang mendukung pengembangan kota cerdas. Ini juga termasuk kerangka kerja hukum yang memfasilitasi

penggunaan teknologi, perlindungan data, serta integrasi infrastruktur fisik dan digital.

2. Penyediaan layanan publik berbasis teknologi: Pemerintah bertanggung jawab dalam menyediakan layanan publik yang efisien dan berbasis teknologi, seperti *e-government*, *smart healthcare*, dan sistem manajemen air yang cerdas. Layanan ini harus mudah diakses oleh semua warga kota untuk meningkatkan kualitas hidup mereka.
3. Edukasi dan pemberdayaan Masyarakat: Untuk suksesnya implementasi kota cerdas, pemerintah perlu mengedukasi dan memberdayakan Masyarakat agar mereka dapat berpartisipasi aktif dalam program ini. Ini termasuk program literasi digital, partisipasi dalam perencanaan kota, serta kampanye kesadaran akan pentingnya keberlanjutan.
4. Keberlanjutan dan lingkungan hidup: pemerintah harus memastikan bahwa inisiatif kota cerdas mendukung tujuan Pembangunan berkelanjutan, termasuk pengurangan emisi karbon, konservasi energi, dan pengelolaan sumber daya yang efisien. Hal ini penting untuk menjaga keseimbangan antara Pembangunan dan kelestarian lingkungan.

DAFTAR PUSTAKA

- Alam, G. N., & Sudirman, A. (2020). Paradiplomacy Pemerintah Kota Bandung Melalui Kerja Sama Sister City. *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional*, 16(1), 31–50. <https://doi.org/10.26593/jihi.v16i1.3365.31-50>
- Besar, D. I. K., & Sumatera, P. (2019). *smart city , konsep kota cerdas sebagai alternatif penyelesaian masalah perkotaan kabupaten / kota , . 14(2).*
- Dedeng Yoesoef Maolani, Amalia Purnama Sari, Arindhini Amalia³, & Cyntia Octavelia Sholeha. (2022). Patologi Birokrasi Dan Upaya Pencegahannya Untuk Menciptakan Birokrasi Yang Efisien. *Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial*, 19(1), 47–56. <https://doi.org/10.54783/dialektika.v19i1.63>
- Fajari, I. A., Muslih, M., & Yahya, Y. K. (2021). Ethical Aspect Of Diplomacy Of Prophet Muhammad (Basic Principle). In *Jurnal Al-Dustur Vol.* researchgate.net.
- Harakan, A. (2023). Indonesia's City Diplomacy in Promoting Global Sustainability Context through Urban Networks. *Ganaya: Jurnal Ilmu Sosial Dan*
- Ii, B. A. B., Pustaka, T., & Kerangka, D. A. N. (n.d.). *No Title.* 3–4.
- Jaya, A. (2004). *konsep pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development) .*
- Nurauliana, R., Jumanah, J., Fadillah, S., & ... (2023). perbandingan implementasi program smart city di pulau jawa dan sumatera: Comparison of the Implementation of Smart City Programs on the *Restorica: Jurnal Ilmiah*
- Nurika, R. R. (2017). Peran Globalisasi di Balik Munculnya Tantangan Baru Bagi Diplomasi di Era Kontemporer. *Jurnal Sosial Politik*, 3(1), 126. <https://doi.org/10.22219/sospol.v3i1.4404>
- Putra, B. D., & Yulindrasari, H. (2023). Peran Organisasi Perempuan dalam Ruang Perkotaan. In *Jurnal Penataan Ruang.* researchgate.net.
- Rahadian, A. H. (2016). Strategi pembangunan berkelanjutan. *Prosiding Seminar STIAMI*, 3(1), 46–56.
- Setiadi, R., Jawoto, S., Sophianingrum, M., & Rosalia, D. (2008). Indikator Pembangunan Berkelanjutan Kota Semarang. *Riptek*, 2(2), 1–6.
- Soraya, T. (2019). Inovasi Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Online di Kabupaten Pati. *Astuti, Puji*, 1–10. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jpgs/article/viewFile/25018/22273>
- Sumatera, I. T., Ryachudu, J. T., & Selatan, L. (2022). *Identifikasi Kemajuan Penerapan Konsep Kota Cerdas di Kota Yogyakarta.* 6, 127–140.
- Suparmoko, M. (2020). Konsep pembangunan berkelanjutan dalam perencanaan pembangunan nasional dan regional. *Jurnal Ekonomika Dan Manajemen*, 9(1), 39–50.
- Widiansyah Anugerah. (2023). *Apa Itu Diplomasi: Mengenal Definisi dan Prinsip Dasar Diplomasi.* Lokalstartupfest.
- Wirawan, R. (2018). Kampung IT-Menuju Pembangunan Berkelanjutan. In *Kumawula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat.* researchgate.net.

- Abdurrozzak D. I. K., & Sumatera, P. (2019). Smart City , Konsep Kota Cerdas Sebagai Alternatif Penyelesaian Masalah Perkotaan Kabupaten / Kota ,. 14(2).
- Alamsyah, M. L., Studi, P., Perencanaan, M., & Arsitektur, S. (2022). *Penerapan Konsep Kota Cerdas di SWK Ujungberung , Kota Bandung*. 6(1).
- Antonius Purwanto. (2022). *Kota Makassar: Pusat Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Timur*. Kompas.Com.
- Bangun, G. E., & Suwandi, I. M. (2022). Kota Cerdas Dan Mobilitas Cerdas: Sebuah Tinjauan Literatur. In *Transparansi: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi* (Vol. 5, Issue 1, pp. 19–25). Institut Ilmu Sosial dan Manajemen stiamI. <https://doi.org/10.31334/transparansi.v5i1.2265>
- Besar, D. I. K., & Sumatera, P. (2019). *smart city , konsep kota cerdas sebagai alternatif penyelesaian masalah perkotaan kabupaten / kota ,. 14(2)*.
- City, S., Smart, M., Di, G., & Serang, K. (2019). *Strategi pemerintah daerah dalam mengembangkan kota cerdas (smart city) melalui smart government di kota serang*. 10, 130–141.
- Fajari, I. A., Muslih, M., & Yahya, Y. K. (2021). Ethical Aspect Of Diplomacy Of Prophet Muhammad (Basic Principle). In *Jurnal Al-Dustur Vol.* researchgate.net.
- Fathun, L. M. (n.d.). *Paradiplomasi Menuju Kota Dunia : Studi Kasus Pemerintah Kota Makassar*. 1, 75–94.
- Fathun, L. M. (2022). Peran Paradiplomacy dalam Presidensi G20 Indonesia: Studi Kasus Diplomasi Kota Jakarta pada Urban 20. *Indonesian Perspective*, 7(1), 57–78. <https://doi.org/10.14710/ip.v7i1.48595>
- Harakan, A. (2023). Indonesia's City Diplomacy in Promoting Global Sustainability Context through Urban Networks. *Ganaya: Jurnal Ilmu Sosial Dan*
- Hasibuan, A., & Sulaiman, O. K. (2019). Smart Cit, Konsep Kota Cerdas Sebagai Alternatif Penyelesaian Masalah Perkotaan Kabupaten/Kota, di Kota-Kota Besar Provinsi Sumatera Utara. *Buletin Utama Teknik*, 14(2), 127–135.
- Ii, B. A. B., Pustaka, T., & Kerangka, D. A. N. (n.d.). *No Title*. 3–4.
- Jaya, A. (2004). *konsep pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development)*.
- No Title*. (2017). 1, 1–12.
- Nur, G., & Sudirman, A. (n.d.). *Paradiplomacy Pemerintah Kota Bandung Melalui Kerja Sama Sister City*. 31–50.
- Nurauliana, R., Jumanah, J., Fadillah, S., & ... (2023). perbandingan implementasi

program smart city di pulau jawa dan sumatera: Comparison of the Implementation of Smart City Programs on the *Restorica: Jurnal Ilmiah*

- Nurika, R. R. (2017). *Peran Globalisasi di Balik Munculnya Tantangan Baru Bagi Diplomasi di Era Kontemporer*. 3(1), 126–141.
- Pangestu, D. K., & Anggraini, W. (2022). strategi pemerintah daerah dalam mengembangkan kota cerdas (smart city) melalui smart government di kota serang. In *PRAJA: Jurnal Ilmiah Pemerintahan* (Vol. 10, Issue 2, pp. 130–141). Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang. <https://doi.org/10.55678/prj.v10i2.660>
- Pertanian, I. (2020). *Strategi Pengembangan Industri Kreatif*. 30(3), 290–298.
- Putra, B. D., & Yulindrasari, H. (2023). Peran Organisasi Perempuan dalam Ruang Perkotaan. In *Jurnal Penataan Ruang*. researchgate.net.
- Rahadian, A. H. (2016). Strategi pembangunan berkelanjutan. *Prosiding Seminar stiarni*, 3(1), 46–56.
- Rahman, I., & Renyoet, C. C. (2020). *Peranan Pemerintah Kota Makassar dan Jayapura sebagai Sub-state Actors Dalam Diplomasi*. May.
- Rilansari, V., Abiyyu Ali, C., Saputri, in, Studi Magister Perencanaan Wilayah dan Kota, P., Arsitektur Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan, S., Teknologi Bandung, I., Ganesha No, J., Studi Perencanaan Wilayah dan Kota, P., Teknologi Infrastruktur dan Kewilayahan, J., Teknologi Sumatera, I., Terusan Ryachudu, J., & Selatan, L. (2022). Identifikasi Kemajuan Penerapan Konsep Kota Cerdas di Kota Yogyakarta. *Rekayasa Hijau : Jurnal Teknologi Ramah Lingkungan*, 6(2), 127–140.
- Rosalina, V., Sugiyani, Y., & ... (2014). Perancangan Infrastruktur Jaringan Komputer Dalam Konsep Membangun Serang Menuju Smart City. *Prosisko: Jurnal*
- Setiadi, R., Jawoto, S., Sophianingrum, M., & Rosalia, D. (2008). Indikator Pembangunan Berkelanjutan Kota Semarang. *Riptek*, 2(2), 1–6.
- Sumatera, I. T., Ryachudu, J. T., & Selatan, L. (2022). *Identifikasi Kemajuan Penerapan Konsep Kota Cerdas di Kota Yogyakarta*. 6, 127–140.
- Suparmoko, M. (2020). Konsep pembangunan berkelanjutan dalam perencanaan pembangunan nasional dan regional. *Jurnal Ekonomika Dan Manajemen*, 9(1), 39–50.
- theory of*. (n.d.).
- Tri, N., Saptadi, S., Atma, U., Makassar, J., Sampe, F., Atma, U., Makassar, J., Chyan, P., Atma, U., & Makassar, J. (2020). *Strategi Penerapan Tata Kelola Smart City Dengan Elemen Smart Readiness (November, 2020)*. December. <https://doi.org/10.53091/jtir.v1i1.1>

- Widiansyah Anugerah. (2023). *Apa Itu Diplomasi: Mengenal Definisi dan Prinsip Dasar Diplomasi*. Lokalstartupfest.
- Wirawan, R. (2018). Kampung IT-Menuju Pembangunan Berkelanjutan. In *Kumawula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*. researchgate.net.
- Yudi. (2019). *Mengintip Sejarah dan Potensi Maritim Kota Makassar*. Indonesiana.
- Hadiningrat, K. P. S. S. (n.d.). *DIGITAL TRANSFORMATION AS THE MAIN MEANS OF SMART CITY*. 65–72.



L

A

M

P

I

R

A

N



Gambar 5 : Wawancara dengan Bapak Yamlikh Azikin bagian analisis sistem informasi badan Perencanaan dan pembangunan daerah Kota Makassar



Gambar 6 : Wawancara dengan Bapak A. Zulfitra Dianta, S.IP, MA, MPP
(Kepala bagian kerja sama pemerintah kota Makassar)



Gambar 7 : Wawancara dengan Ibu Ivana Mursalin S.E (KASUBAG Perencanaan Bappeda Kota Makassar)



Gambar 8 : Wawancara dengan Pak Ikhsan Bagian Perencana Ahli Madya BAPPEDA



Gambar 9 : Wawancara dengan Pak Muhammad Rezky, S. Pd., M. Kom.
(bidang aptika kominfo)



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
DINAS PENANAMAN MODAL, PERALYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Jendral A. Yani No. 2, Makassar 90121
Website: dpmptp.makassarkota.go.id

SURAT KETERANGAN PENELITIAN
Nomor: 070/3809/SK/SH/DPMP/SP/7.2024

DASAR:

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penerbitan Keterangan Penelitian,
- Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah
- Peraturan Walikota Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko, Perizinan Non Berusaha dan Non Perizinan
- Keputusan Walikota Makassar Nomor 954/503 Tahun 2023 Tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Non Berusaha dan Non Perizinan yang Merjadi Kewenangan Pemerintah Daerah kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Makassar Tahun 2023
- Surat Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Selatan nomor 14999/S.01/PTSP/2024, Tanggal 10 Juni 2024
- Rekomendasi Teknis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar nomor 2803/SK/SH/BKBP/VII/2024


Dengan Ini Menerangkan Bahwa :

Nama	: NURHALIZA
NIM / Jurusan	: 105641105520 / Ilmu Pemerintahan
Pekerjaan	: Mahasiswa (S1) / Universitas Muhammadiyah Makassar
Alamat	: Jl. Sultan Alauddin No. 259, Makassar
Lokasi Penelitian	: Terhalap, -
Waktu Penelitian	: 10 Juni 2024 - 10 Juli 2024
Tujuan	: Skripsi
Judul Penelitian	: DIPLOMASI KOTA MELALUI JEJARING KOTA CERDAS UNTUK PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DI KOTA MAKASSAR

Dalam melakukan kegiatan agar yang bersangkutan memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- Surat Keterangan Penelitian ini diterbitkan untuk kepentingan penelitian yang bersangkutan selama waktu yang sudah ditentukan dalam surat keterangan ini.
- Tidak dibenarkan melakukan penelitian yang tidak sesuai / tidak ada kaitannya dengan judul dan tujuan kegiatan penelitian.
- Melaporkan hasil penelitian kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar melalui email bidangkossbudkebangpolmks@gmail.com.
- Surat Keterangan Penelitian ini dicabut kembali apabila pemegangnya tidak menaati ketentuan tersebut diatas.


Ditetapkan di Makassar
Pada tanggal: 05 Juli 2024

 Ditandatangani secara elektronik oleh
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA MAKASSAR
HELMY BUDIMAN, S.STP., M.M.

Tembusan Kepada Yth:

- Pimpinan Lembaga/Instansi/Perusahaan Lokasi Penelitian;
- Pertinggal,-

PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA)
 JL JEND. A. YANI NO. 2 MAKASSAR



LEMBAR DISPOSISI		DITERIMA TANGGAL
SURAT DARI	Dinas PTSP	8/7/24
NO. & TGL SURAT	076/2009/SP/18 5/7	NO. AGENDA
PERHAL	Suker Penelitian	139
(ISI DISPOSISI KEPALA BADAN)	DITERUSKAN KEPADA 1. SEKRETARIS 2. KEPALA BIDANG PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN 3. KEPALA BIDANG EKONOMI & SUMBER DAYA ALAM (SDA) 4. KEPALA BIDANG SOSIAL BUDAYA & PEMERINTAHAN UMUM 5. KEPALA BIDANG INFRASTRUKTUR & PENGEMBANGAN WILAYAH 6. PEJABAT FUNGSIONAL	
Dari Sekretaris :	KEPALA BIDANG	

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
 LEMBAGA PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
 Jl. Sultan Al-Mudliin No. 259 Telp. 085221166-188 Makassar 70221 e-mail: pp2@unismuh.ac.id

Nomor : 4421/05/C.4-VIII/VI/1445/2024 Lamp : 1 (satu) Rangkap Proposal Hal : Permohonan Izin Penelitian	04 June 2024 M 27 Dzulqad'ah 1445
---	--------------------------------------

Kepada Yth.
 Bapak Gubernur Prov. Sul-Sel
 Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal & PTSP Provinsi Sulawesi Selatan,
 di -
 Makassar

Berdasarkan surat Dekan Fakultas Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, nomor: 0439/FSP/A.6-VIII/V/1445 H/2024 M tanggal 30 Mei 2024, menerangkan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : NURHALIZA
 No. Stambuk : 10564 1105520
 Fakultas : Fakultas Sosial dan Politik
 Jurusan : Ilmu Pemerintahan
 Pekerjaan : Mahasiswa

Bermaksud melaksanakan penelitian/pengumpulan data dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul :

"Diplomasi Pemerintah melalui Jejaring Kota Cerdas untuk Pembangunan Berkelanjutan Kota Makassar"


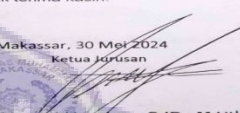
Yang akan dilaksanakan dari tanggal 7 Juni 2024 s/d 7 Agustus 2024.

Sehubungan dengan maksud di atas, kiranya Mahasiswa tersebut diberikan izin untuk melakukan penelitian sesuai ketentuan yang berlaku.
 Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan Jazakumullah Khaeran

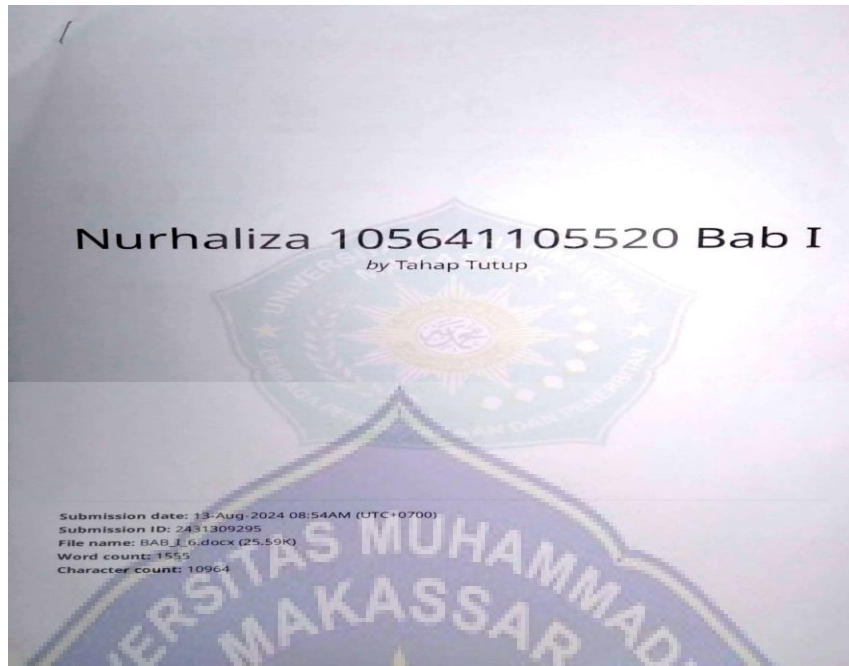


 Kepala LP3M,
 Dr. Muh. Arief Muhsin, M.Pd.
 NBM 1127761

06-24

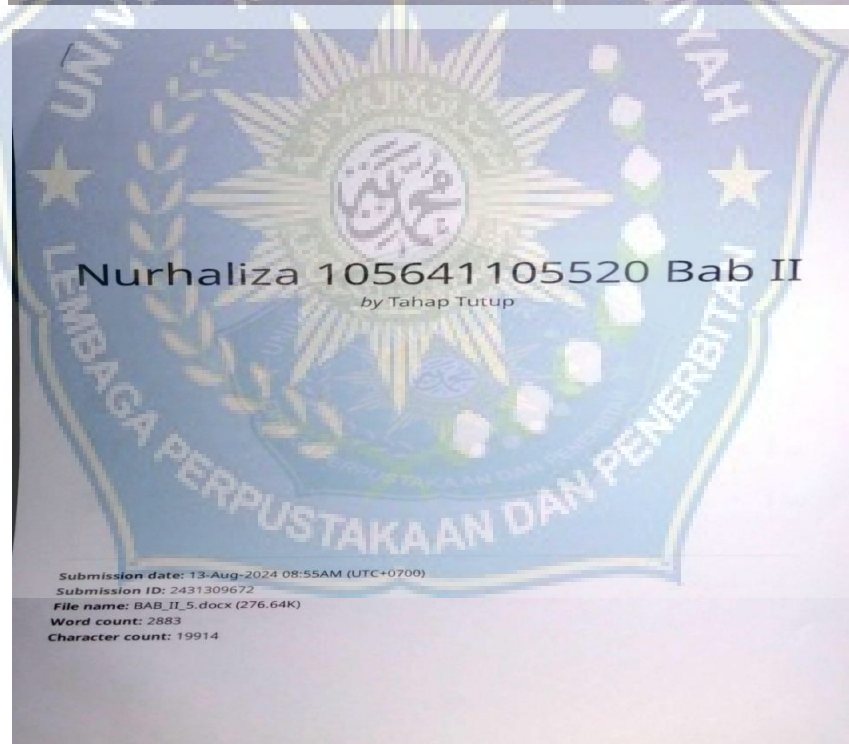
	Universitas Muhammadiyah Makassar <small>Integrity - Professionalism - Entrepreneurship</small>	Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik <small>Faculty of Social and Political Sciences</small> <small>Nomers Jalan Lantia 3 - Jalan Sultan Alauddin No. 259 Makassar 90221</small> <small>Telp: (0411) 866 972 Fax: (0411) 865 588</small> <small>Official Email: fosp@unismuh.ac.id</small> <small>Official Web: https://fisp.unismuh.ac.id</small>
Nomor Lamp. Hal	: 0 439/FSP/A.6-VIII/V/1445H/2024 M : 1 (satu) Eksamplar : Pengantar Penelitian	
	Kepada Yth. Bapak Rektor, Cq. Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (LP3M) Unismuh Di Makassar	
	Assalamu Alaikum Wr. Wb.	
	Sehubungan dengan rencana penelitian mahasiswa untuk melengkapi data dalam rangka Penulisan Skripsi, maka diharapkan kepada Bapak/Ibu kiranya dapat memberikan Pengantar Penelitian kepada :	
Nama Mahasiswa	: Nurhaliza	
Stambuk	: 105641105520	
Jurusan	: Ilmu Pemerintahan	
Lokasi Penelitian	: Kota Makassar.	
Judul Skripsi	: "Diplomasi Pemerintah Melalui Jejaring Kota Cerdas Untuk Pembangunan Berkelanjutan Kota Makassar"	
	Demikian Pengantar Penelitian ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya yang baik, diucapkan banyak terima kasih. Jazakumullahu Khaeran Katziraa. Wassalamu Alaikum Wr. Wb.	
	Makassar, 30 Mei 2024 Ketua Jurusan  Ahmad Harakan, S.IP., M.HI NBM : 1207 163	

	MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN <small>Alamat Kantor: Jl. Sultan Alauddin No.259 Makassar 90221 Tlp: (0411) 866972,881593, Fax: (0411) 865588</small>																								
SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT																									
UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar, Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:																									
Nama	: Nurhaliza																								
Nim	: 105641105520																								
Program Studi	: Ilmu Pemerintahan																								
Dengan nilai:																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Bab</th> <th>Nilai</th> <th>Ambang Batas</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Bab 1</td> <td>1 %</td> <td>10 %</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Bab 2</td> <td>4 %</td> <td>25 %</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Bab 3</td> <td>10 %</td> <td>10 %</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Bab 4</td> <td>6 %</td> <td>10 %</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Bab 5</td> <td>4 %</td> <td>5 %</td> </tr> </tbody> </table>	No	Bab	Nilai	Ambang Batas	1	Bab 1	1 %	10 %	2	Bab 2	4 %	25 %	3	Bab 3	10 %	10 %	4	Bab 4	6 %	10 %	5	Bab 5	4 %	5 %	
No	Bab	Nilai	Ambang Batas																						
1	Bab 1	1 %	10 %																						
2	Bab 2	4 %	25 %																						
3	Bab 3	10 %	10 %																						
4	Bab 4	6 %	10 %																						
5	Bab 5	4 %	5 %																						
Dinyatakan telah lulus cek plagiat yang diadakan oleh UPT- Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar Menggunakan Aplikasi Turnitin																									
Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.																									
Makassar, 14 Agustus 2024 Mengetahui, Kepala UPT- Perpustakaan dan Penerbitan,  Nurhidayah Sum, MLP NBM: 9647591																									
<small>Jl. Sultan Alauddin no 259 makassar 90222 Telepon (0411)866972,881 593,fax (0411)865 588 Website: www.library.unismuh.ac.id E-mail : perpus@unismuh.ac.id</small>																									



Nurhaliza 105641105520 Bab I
by Tahap Tutup

Submission date: 13-Aug-2024 08:54AM (UTC+0700)
Submission ID: 2431309295
File name: BAB_I_6.docx (25.59K)
Word count: 1555
Character count: 10964



Nurhaliza 105641105520 Bab II
by Tahap Tutup

Submission date: 13-Aug-2024 08:55AM (UTC+0700)
Submission ID: 2431309672
File name: BAB_II_5.docx (276.64K)
Word count: 2883
Character count: 19914

Nurhaliza 105641105520 Bab II

ORIGINALITY REPORT

4% SIMILARITY INDEX

1% INTERNET SOURCES

2% PUBLICATIONS

2% STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	Maulida Putri Rahmawati, Muhammad Fatchuriza. "Inovasi Pemerintahan Daerah: Aplikasi Siapp Sebagai Dukungan Smart City Di Kabupaten Kendal", <i>Journal of Government and Politics (JGOP)</i> , 2022	2%
2	Submitted to Universitas Pancasila	1%
3	repository.unej.ac.id	1%
4	digilib.iain-palangkaraya.ac.id	<1%
5	www.ifacs.or.id	<1%

Exclude quotes Off

Exclude bibliography Off

Exclude matches Off

Nurhaliza 105641105520 Bab III

by Tahap Tutup

Submission date: 13-Aug-2024 08:56AM (UTC+0700)

Submission ID: 2431310005

File name: BAB_III_6.docx (24.84K)

Word count: 1053

Character count: 7203

Nurhaliza 105641105520 Bab III

ORIGINALITY REPORT

10% SIMILARITY INDEX

8% INTERNET SOURCES

0% PUBLICATIONS

4% STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	digilib.iain-palangkaraya.ac.id	3%
2	repository.usd.ac.id	2%
3	digilibadmin.unismuh.ac.id	2%
4	www.paketinternet.id	2%
5	Submitted to Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin	2%

Exclude quotes On

Exclude bibliography On

Exclude matches = 2%





DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nurhaliza dilahirkan di Makassar pada 5 April 2002, Merupakan anak bungsu/terakhir dari pasangan Bapak Imran dg. Mannang dan Ibu Sarpiah. Penulis menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar di SD INPRES RAPPOKALLING II di tahun 2014. Kemudian melanjutkan pendidikan di SMP NEGERI 4 MAKASSAR dan lulus pada tahun 2017. Kemudian melanjutkan pendidikan di SMA MUHAMMADIYAH 7 MAKASSAR dan lulus pada tahun 2020. Kemudian melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi, tepatnya di Universitas Muhammadiyah Makassar pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Dengan ketekunan untuk terus belajar dan berusaha serta dukungan dari orang terkasih, penulis dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi ini pada Tahun 2024 tepatnya pada 16 agustus 2024, penulis dikukuhkan dengan gelar sarjana ilmu politik (S.IP) dengan judul penelitian “Diplomasi pemerintah melalui jejaring kota cerdas untuk Pembangunan berkelanjutan di kota Makassar”. Semoga dengan adanya karya ilmiah ini dapat menjadi kontribusi bagi peneliti lain, dan bagi penulis sendiri, Terimakasih.

